

Dampak Kegiatan Usaha Hulu Migas Terhadap Perekonomian Regional Wilayah Kerja Migas (Studi Kasus Provinsi Jambi)



PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEMENTERIAN ESDM
2016



Dampak Kegiatan Usaha Hulu Migas terhadap Perekonomian Regional Wilayah Kerja Migas (Studi Kasus Provinsi Jambi)



**PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

2016

TIM PENYUSUN

Pengarah

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM
M. Teguh Pamudji

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM
Susetyo Edi Prabowo

Ketua

Kepala Bidang Kajian Strategis
Sugeng Mujiyanto

Anggota:

Khoiria Oktaviani
Agus Supriadi
Agung Wahyu Kencono
Bambang Edi Prasetyo
Catur Budi Kurniadi
Tri Nia Kurniasih
Feri Kurniawan
Yogi Alwendra
Qisthi Rabbani
Ririn Aprillia
Indra Setiadi
Dini Anggreani

ISBN: 978-602-0836-23-2

Penerbit

Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18 Jakarta Pusat 10110
Telp : (021) 4804242 ext 7902
Fax : (021) 3519882
Email : pusdatin@esdm.go.id

Cetakan pertama, Desember 2016

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa
ijin tertulis dan penerbit.

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya penyusunan publikasi hasil kajian “Dampak Kegiatan Usaha Hulu Migas Terhadap Perekonomian Regional Wilayah Kerja Migas (Studi Kasus Provinsi Jambi)” ini dapat kami selesaikan pada akhir 2016.

Sesuai dengan judulnya, publikasi ini akan lebih banyak memberikan gambaran tentang dampak yang muncul dari aktivitas hulu migas terutama dari sisi perekonomian, pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kondisi infrastruktur di wilayah sekitar kegiatan hulu migas.

Selain data yang diperoleh langsung melalui FGD maupun kunjungan lapangan, kajian ini menggunakan data dan informasi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jambi, Ditjen Migas KESDM, Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu dan beberapa jurnal terkait.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan membantu penyusunan buku ini. Selamat membaca, semoga publikasi ini bermanfaat dan menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan kebijakan energi nasional.

Jakarta, Desember 2016

Penyusun

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber di bawah ini yang telah memberikan saran-saran yang berharga bagi peningkatan kualitas buku ini.

1. Nuzul Achjar (Universitas Indonesia)
2. Peggy Hariwan (Universitas Telkom)
3. Aulia Hadi (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sumber daya minyak dan gas bumi (migas) Indonesia sudah dieksploitasi lebih dari 125 tahun, berawal dari ditemukannya sumur minyak bumi pertama di Desa Telaga Said, Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Miliaran barel migas telah mengalir dari perut bumi yang menjadi sumber pendapatan bagi negara, juga sebagai salah satu motor penggerak perekonomian nasional setiap tahunnya. Namun, potret umum yang terjadi di wilayah penghasil migas masih jauh dari harapan. Tingginya angka kemiskinan, rendahnya indeks pembangunan manusia, serta minimnya pembangunan infrastruktur masih menjadi masalah utama di sekitar wilayah kerja migas.

Mencoba memotret lebih jauh kondisi masyarakat di sekitar wilayah kerja migas, buku ini mengulas lebih dalam tentang dampak kegiatan usaha hulu migas terhadap perekonomian regional Provinsi Jambi, dimana daerah penghasil migas terbesar berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam kurun waktu 2012 s.d. 2014, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas menyumbangkan hampir 30% pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini cukup signifikan mengingat realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur hampir 80% lebih berasal dari dana perimbangan pusat-daerah (dimana DBH termasuk didalamnya).

Menganalisis lebih dalam terhadap dua parameter dominan yaitu PDRB dan Dana Bagi Hasil Migas serta didukung oleh berbagai data sekunder lainnya, Pusdatin ESDM melakukan kajian dampak aktivitas kegiatan hulu migas terhadap perekonomian di daerah sekitar wilayah kerja migas. Diharapkan setelah mengetahui berbagai peningkatan aktivitas (ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur), akan didapatkan rekomendasi bagi berbagai pemangku kepentingan dalam hal ini Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah, Kontraktor Migas dan Masyarakat dalam mengambil kebijakan di sektor pengelolaan migas.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	6
1.3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7

BAB II METODOLOGI

2.1. Ruang Lingkup	8
2.2. Sumber Data & Metode Analisis	8
2.3. Metode Pengolahan Data	9
2.3.1. Studi Literatur	9
2.3.2. Observasi, Wawancara dan FGD.....	9
2.3.3. Penyebaran Kuesioner	10
2.4. Metode Analisis Data	13

BAB III MIGAS DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

3.1. Migas dan Perekonomian Negara	14
3.2. Peran Sektor Migas dalam Pertumbuhan Ekonomi	15
3.3. Pembangunan Berkelanjutan	16
3.4. Peran Sektor Hulu Migas terhadap Perekonomian Indonesia	19

BAB IV PROVINSI JAMBI DAN INDUSTRI MIGAS	
4.1.	Kondisi Geografis Provinsi Jambi 21
4.2.	Kondisi Perekonomian 22
	4.2.1. PDRB Kabupaten/Kota..... 23
	4.2.2. Dana Bagi Hasil Migas 25
4.3.	Kependudukan dan Tenaga Kerja..... 26
4.4.	Profil Wilayah Kerja Migas di Provinsi Jambi 28
BAB V ANALISIS DAMPAK KEGIATAN HULU MIGAS DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG, PROVINSI JAMBI	
5.1.	Hasil Pengumpulan Data..... 30
5.2.	Dampak Ekonomi di Sekitar Wilayah Kerja Migas 36
5.3.	Dampak Sosial (Pembangunan Sumber Daya Manusia) 42
5.4.	Dampak Pengembangan Wilayah..... 49
5.5.	Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Migas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)..... 56
BAB VI PENUTUP	
6.1.	Kesimpulan..... 59
6.2.	Rekomendasi 60
DAFTAR PUSTAKA 61	
LAMPIRAN 63	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Area Kontrak Wilayah Kerja Migas Indonesia	1
Gambar 3.1. Kegiatan Usaha Hulu Migas	19
Gambar 4.1. Peta Provinsi Jambi	21
Gambar 5.1. Dokumentasi Penyebaran Kuesioner	29

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Lifting Migas Tahun 2010 – 2015	2
Grafik 1.2. Provinsi Penghasil Migas.....	4
Grafik 5.1. Sebaran Responden	30
Grafik 5.2. Sebaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ..	31
Grafik 5.3. Sebaran Responden Berdasarkan Kelompok Usia	32
Grafik 5.4. Sebaran Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	33
Grafik 5.5. Sebaran Responden Berdasarkan Pekerjaan	34
Grafik 5.6a. Sebelum Ada Kegiatan Migas	35
Grafik 5.6b. Sesudah Ada Kegiatan Migas	35
Grafik 5.7. Dampak Ekonomi	37
Grafik 5.8. Tiga Dampak Ekonomi Yang Paling Dirasakan Setelah Adanya Kegiatan Hulu Migas	38
Grafik 5.9. Skor Dampak Ekonomi	39
Grafik 5.10. Skor Kinerja Pembangunan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2014	42
Grafik 5.11. Dampak Sosial.....	43
Grafik 5.12. Tiga Dampak Sosial Yang Paling Dirasakan Setelah Adanya Kegiatan Hulu Migas	44
Grafik 5.13. Skor Dampak Sosial	45
Grafik 5.14. Skor Kinerja Pembangunan SDM Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2014	48
Grafik 5.15. Dampak Pengembangan Wilayah	50
Grafik 5.16. Tiga Dampak Pengembangan Wilayah Yang Paling Dirasakan Setelah Adanya Kegiatan Hulu Migas ...	51
Grafik 5.17. Skor Dampak Pengembangan Wilayah	52
Grafik 5.18. Skor Kinerja Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2014	55
Grafik 5.19. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.....	56
Grafik 5.20. Realisasi Pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	57

DAFTAR TABEL

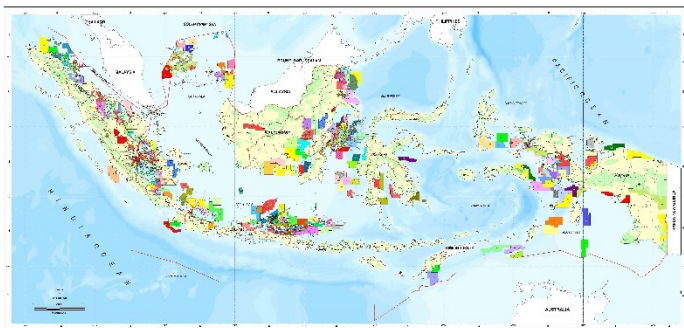
Tabel 1.1.	Target dan Realisasi Penerimaan Negara.....	3
Tabel 1.2.	IPM di Kab/Kota Provinsi Jambi	5
Tabel 4.1.	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	24
Tabel 4.2.	Realiasi Pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	26
Tabel 4.3.	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	27
Tabel 4.4.	Angkatan Kerja Tanjung Jabung Timur	27
Tabel 5.1.	Tingkat Dampak Ekonomi.....	40
Tabel 5.2.	Tingkat Dampak Sosial.....	46
Tabel 5.3.	Tingkat Dampak Pengembangan Wilayah	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak dimulainya industrialisasi migas modern pada pertengahan abad ke-19, industri migas telah memainkan peran dominan bagi pertumbuhan ekonomi di berbagai belahan dunia, baik dari sisi penghasil (produsen) maupun dari sisi pengguna (konsumen). Begitu pula di Indonesia, industri migas yang sudah dieksploitasi lebih dari 125 tahun dan meliputi area kontrak wilayah kerja seperti ditunjukkan pada gambar 1.1, telah melalui berbagai siklus dan perubahan yang mengharuskannya beradaptasi. Dipengaruhi perubahan teknologi, tingkat kebutuhan dan juga fluktuasi harga migas dunia, produksi produksi gas nasional beberapa tahun terakhir justru menunjukkan angka yang lebih besar dibanding produksi minyak buminya.

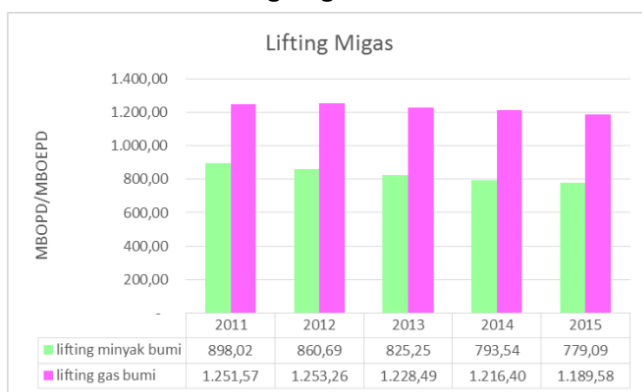


Sumber: Pusdatin KESDM

Gambar 1.1 Area Kontrak Wilayah Kerja Migas Indonesia

Kontribusi produksi gas nasional saat ini mencapai 60% terhadap porsi produksi migas total. Kondisi ini diproyeksikan akan terus meningkat mencapai 70% pada 2020 dan 86% pada 2050, mengingat potensi gas bumi yang lebih besar dibandingkan dengan minyak bumi nasional. Laporan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tahun 2015 menunjukkan, realisasi produksi migas Indonesia sebesar 2,24 juta barel minyak ekuivalen per hari (MMboepd). Pencapaian tersebut diperoleh dari produksi minyak dan kondensat rata-rata sebesar 786 ribu barel per hari (Mbopd), sementara produksi gas sebesar 8,113 juta kaki kubik per hari (MMscfd). Adapun lifting migas tahun 2010-2015 berdasarkan Laporan Tahunan SKK Migas ditunjukkan pada grafik 1.1 berikut.

Grafik 1.1 Lifting Migas Tahun 2010 – 2015



Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2015

Penerimaan negara dari sektor hulu migas pada tahun 2015 (1 Januari s.d. 31 Desember 2015) mencapai USD 11,9 miliar dengan rincian untuk penerimaan minyak bumi sebesar USD 5,7 miliar dan penerimaan gas bumi sebesar USD 6,2 miliar. Angka ini memenuhi 86% target penerimaan negara pada Revisi WP&B tahun

2015 sebesar USD 13,8 miliar (40% dari *total revenue* yang dihasilkan oleh industri hulu migas).

Dengan besaran angka tersebut, dapat dikatakan bahwa sektor migas di Indonesia merupakan sektor strategis dalam mendorong roda perekonomian nasional, dengan menyumbang sekitar 20% terhadap pendapatan negara per-tahunnya (2010 s.d. 2015). Realisasi penerimaan negara dari sektor migas terhadap APBN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Negara dari Sektor Migas 2011-2015

Tahun	APBN	APBNP	Realisasi	% (APBN)	% (APBNP)
2011	215335,95	249594,60	278389,50	129	112
2012	231106,49	278020,54	301629,52	131	108
2013	257279,25	267118,73	305569,85	119	114
2014	286028,60	309933,32	320254,11	112	103
2015	326964,86	139374,5	136077,98	42	98

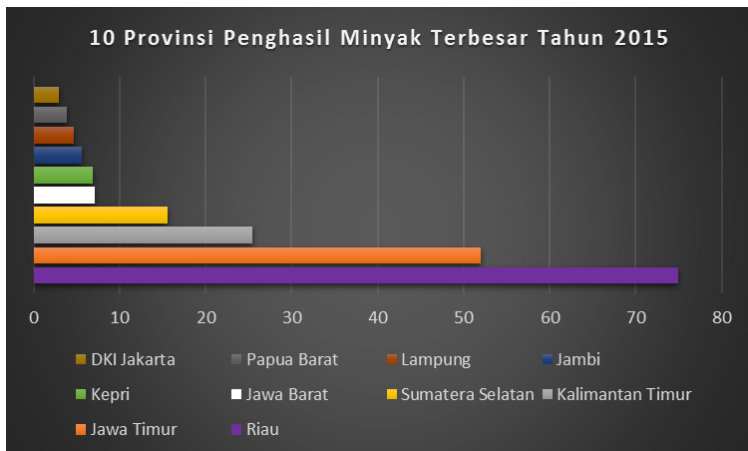
Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2015

Berdasarkan tabel 1.1, dapat kita lihat bahwa secara pencapaian target, realisasi penerimaan Negara dari sektor migas mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Perlambatan ekonomi dunia yang berdampak pada turunnya harga minyak dunia hingga berada di bawah US\$ 50 per barel selama dua tahun terakhir ditengarai sebagai faktor utama penyebab turunnya penerimaan negara sektor migas, yang terlihat pada realisasi pendapatan tahun 2015, hanya mencapai Rp 136 triliun.

Berbicara tentang wilayah produksinya, migas di Indonesia dihasilkan dari beberapa titik di wilayah nusantara. Provinsi penghasil migas antara lain Riau, Kalimantan Timur, Sumatera

Selatan dan Jambi. Sementara itu, produksi masing-masing provinsi penghasil minyak bumi ditunjukkan oleh grafik 1.2. Dari grafik tersebut, dapat kita lihat bahwa Provinsi Riau berada pada posisi pertama penyumbang lifting minyak bumi nasional, disusul oleh Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi.

Grafik 1.2 Provinsi Penghasil Minyak Bumi Terbesar



Sumber: Diolah dari Data Ditjen Migas

Keberadaan sektor hulu migas selain memberikan dampak langsung, juga akan memberikan dampak tidak langsung serta dampak berganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian. Keberadaan kegiatan usaha hulu migas ini akan memicu tumbuhnya perekonomian daerah. Kontribusi sektor hulu migas dalam perekonomian bisa dilihat dari peran sektor tersebut dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau secara lebih khusus dapat dicerminkan dari PDRB per kapita.

Sudah seharusnya sebagai penyumbang pendapatan yang signifikan, daerah penghasil migas juga memperoleh manfaat “multiplier” terbesar dengan adanya wilayah kerja tersebut. Namun,

kondisi sosial-ekonomi masyarakat di beberapa daerah penghasil justru menunjukkan beberapa indikator ekonomi sosial dan pembangunan yang lebih rendah dibanding daerah lain yang bukan penghasil di provinsi tersebut.

Sebagai salah satu contoh, dua kabupaten di Provinsi Jambi, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai daerah penghasil migas justru memiliki data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jambi (Tabel 1.2).

Mencermati fenomena tersebut, publikasi Pusdatin ESDM kali ini akan memberikan gambaran dampak aktivitas WK migas terhadap perekonomian regional, dengan mengambil studi kasus di Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebuah kabupaten penghasil migas namun memiliki angka IPM terendah di provinsi tersebut. Melalui publikasi ini diharapkan kondisi sosial, ekonomi, dan pembangunan di wilayah penghasil migas dapat lebih mendapat perhatian sehingga sumber daya alam Indonesia benar-benar termanfaatkan untuk mensejahterakan rakyat.

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia di Kab/Kota di Provinsi Jambi

**daerah penghasil migas*

Kabupaten/Kota	IPM		Rangking	
	2013	2014	2013	2014
Kab Batanghari*	67,24	67,68	5	5
Kab Bungo	65,54	67,93	3	4
Kab Kerinci	67,49	67,96	4	3
Kab Merangin	65,82	66,21	8	8
Kab Muaro Jambi	65,14	65,71	9	9
Kab Sarolangun*	67,13	67,67	6	6
Kab Tanjab Timur*	59,41	59,88	11	11
Kab Tanjab Barat*	63,54	64,04	10	10

Kab Tebo*	65,91	66,63	7	7
Kota Jambi*	74,21	74,86	1	1
Kota Sungai Penuh	72,09	72,48	2	2

Sumber: Jambi Dalam Angka 2015

1.2 Maksud dan Tujuan

Kajian dampak kegiatan usaha hulu migas terhadap perekonomian regional wilayah kerja migas di Provinsi Jambi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan menganalisis hubungan antara kegiatan usaha hulu migas dengan kondisi sosial ekonomi di lingkungan sekitar wilayah kerja migas. Diharapkan hasil kajian dapat memberikan rekomendasi kebijakan dalam pengembangan rencana pembangunan berkelanjutan ke depan, terutama bagi daerah penghasil migas di Indonesia.

1.3 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan dalam kajian dampak kegiatan usaha hulu migas terhadap perekonomian regional Provinsi Jambi meliputi:

1. Pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi, demografi, sumber daya yang dimiliki, sejarah WK migas yang ada, serta aktifitas industri migas di Provinsi Jambi melalui studi literatur, kunjungan lapangan, penyebaran survei singkat, serta rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan;
2. Pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap parameter kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait WK migas serta program kegiatan aktivitas migas dan aktivitas

Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh pemegang WK Migas;

3. Pembahasan hasil analisis menggunakan analisis faktor dan deskriptif kualitatif melalui koordinasi dengan ahli ekonomi, ahli statistika, ahli kependudukan dan pemangku kepentingan melalui rapat koordinasi;
4. Perumusan usulan rekomendasi kebijakan; dan
5. Penyusunan laporan akhir.

1.4 Sistematika Penulisan

Laporan hasil kajian dampak kegiatan usaha hulu migas terhadap perekonomian regional Provinsi Jambi ini disusun dalam 6 Bab yang terdiri dari:

- | | |
|---------|--|
| Bab I | Pendahuluan; |
| Bab II | Metodologi; |
| Bab III | Migas dan Pembangunan Berkelanjutan; |
| Bab IV | Provinsi Jambi dan Industri Migas; |
| Bab V | Analisis Dampak Kegiatan Hulu Migas di Provinsi Jambi; |
| Bab VI | Penutup. |

BAB II

METODOLOGI

2.1 Ruang Lingkup

Publikasi kajian Pusdatin ESDM kali ini akan memfokuskan pada analisis dan evaluasi dampak aktivitas WK migas terhadap perekonomian regional, dengan mengambil studi kasus di Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebuah kabupaten penghasil migas namun memiliki angka IPM terendah di provinsi tersebut. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri, terdapat beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), salah satunya adalah Petrochina Jabung Ltd yang memproduksi migas yang cukup besar dan signifikan menyumbang pendapatan nasional dan daerah.

2.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam kajian ini berupa data primer dan data sekunder, baik kualitatif maupun kuantitatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara langsung, *Focus Group Discussion* (FGD) dan penyebaran kuesioner di lokasi penelitian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jambi, Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jambi, Direktorat Jenderal Migas KESDM, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, hasil-hasil penelitian sebelumnya, serta pustaka terkait lainnya.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti yang tertulis dalam Bab I, ada beberapa metode analisis yang digunakan dalam kajian ini, yaitu:

2.3.1 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dalam rangka mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian studi literatur dijadikan sebagai fondasi dasar dan alat utama bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi di lapangan. Referensi yang digunakan antara lain jurnal-jurnal yang sudah dipublikasikan, buku terkait ekonomi pembangunan dan pembangunan berkelanjutan, serta publikasi dari BPS dan stakeholder lainnya.

2.3.2 Observasi, Wawancara dan FGD

Untuk mendapatkan data primer yang akan dianalisis secara kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan kegiatan FGD. Observasi dan wawancara dilakukan melalui kunjungan langsung ke Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur guna melihat realitas keadaan masyarakat, dan kemudian melakukan wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat yang dianggap mewakili aspirasi dari masyarakat setempat. FGD dilakukan untuk menghimpun opini publik dengan mengundang perwakilan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jambi, BAPPEDA, BPS, Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, tenaga ahli serta beberapa stakeholder terkait lainnya, sehingga diperoleh pandangan yang komprehensif terkait kajian yang diangkat dan dapat dirumuskan rekomendasi yang tepat sebagai bahan bagi para pengambil keputusan.

2.3.3 Penyebaran Kuesioner

Dengan menggunakan kuesioner, analis berupaya mengukur apa yang ditemukan dalam wawancara, selain itu juga untuk menentukan seberapa luas atau terbatasnya sentimen yang diekspresikan dalam suatu wawancara. Kuesioner disebarakan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jambi, BAPPEDA Provinsi Jambi, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tokoh masyarakat di sekitar WK migas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, masyarakat asli yang bekerja KKKS Petrochina International Jabung. Kuesioner ini berfungsi untuk mengetahui tanggapan setiap responden mengenai efek perekonomian, pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur dari keberadaan WK Migas.

Adapun alur dalam penyiapan sampai hasil dari kuesioner meliputi:

- a. Merancang kuesioner yang akan digunakan untuk mengetahui indeks persepsi masyarakat di sekitar wilayah kerja migas tentang pertumbuhan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur;
- b. Dalam kuesioner tersebut, yang direkomendasikan untuk mengisi kuesioner adalah tokoh masyarakat sekitar WK migas, penduduk asli yang bekerja di sektor migas, pemangku kepentingan di sektor migas (Dinas Pertambangan dan Energi serta BAPPEDA);
- c. Menganalisis sederhana secara deskriptif kualitatif;
- d. Menganalisis lebih dalam menggunakan analisis komponen utama dan dilanjutkan dengan analisis faktor dengan mengkomparasi dengan data sekunder yang berasal dari BPS;
- e. Mendapatkan *feedback* dari *stakeholders* dan pelaku usaha migas di sekitar WK migas;
- f. Menganalisis program apa saja yang dibutuhkan masyarakat di sekitar WK migas.

Setiap responden berhak untuk menjawab atau memberi nilai ke setiap pertanyaan atau pernyataan yang ada dalam kuesioner. Penilaian ini memiliki *range* antara 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Interpretasi dari setiap pertanyaan dan skala penilaian adalah sebagai berikut:

a. Teknis pada bab DAMPAK EKONOMI

Pada bagian ini, responden diharapkan untuk memberikan penilaian mengenai hal-hal terkait kesempatan kerja, penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan upah, pertumbuhan usaha lain, dan pengembangan ekonomi masyarakat.

b. Teknis pada bab DAMPAK PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada bagian ini, responden diharapkan untuk memberikan penilaian mengenai hal-hal terkait sarana prasarana pendidikan & kesehatan, kualitas tenaga pendidik & kesehatan, dan pemberdayaan pendidikan & kesehatan yang dilakukan KKKS terhadap masyarakat sekitar.

c. Teknis pada bab DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Pada bagian ini, responden diharapkan untuk memberikan penilaian mengenai hal-hal terkait kondisi jalan, sarana transportasi, pengembangan hasil produk, jaringan telekomunikasi dan kemudahan akses.

Penilaian didasarkan pada skala penilaian satu sampai dengan empat, dengan keterangan sebagai berikut:

SANGAT SETUJU dengan *point* 1

Penilaian ini diberikan oleh responden jika mereka merasa memiliki pendapat sangat sesuai dengan pernyataan/pertanyaan dari kuisisioner.

SETUJU dengan *poin 2*

Penilaian ini diberikan oleh responden jika mereka merasa memiliki pendapat sesuai dengan pernyataan/pertanyaan dari kuisisioner.

TIDAK SETUJU dengan *poin 3*

Penilaian ini diberikan oleh responden jika mereka merasa tidak sependapat dengan pernyataan/pertanyaan dari kuisisioner.

SANGAT TIDAK SETUJU dengan *poin 4*

Penilaian ini diberikan oleh responden jika mereka merasa sangat tidak sependapat dengan pernyataan/pertanyaan dari kuisisioner.

Kuesioner yang dibagikan memiliki pertanyaan sebagai berikut:

I. DAMPAK EKONOMI

1. Usaha Hulu Migas Membuka Kesempatan Kerja Yang Cukup Besar di Daerah Ini ?
2. Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Pada Kegiatan Hulu Migas di Daerah Ini Cukup Tinggi
3. Tenaga Kerja Lokal Mendapat Prioritas Untuk Bekerja di Perusahaan
4. Upah Yang Diterima Karyawan Perusahaan Sesuai Dengan Harapan Masyarakat
5. Kegiatan Hulu Migas Meningkatkan Penghasilan Responden
6. Kegiatan Hulu Migas Mengakibatkan Peningkatan Aktivitas Usaha Yang Telah Ada di Daerah ini
7. Kegiatan Hulu Migas Menumbuhkan Peluang Usaha Lain Bagi Masyarakat di Desa Ini
8. Perusahaan Melakukan Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah Ini

II. DAMPAK PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Ketersediaan Prasarana Pendidikan Bertambah
2. Terjadi Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik
3. Kemampuan Untuk Memenuhi Uang Sekolah Anak Lebih Baik
4. Kemampuan Untuk membeli Buku-Buku Pelajaran Anak Lebih Baik
5. Ketersediaan Prasarana Kesehatan Bertambah
6. Terjadi Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan
7. Kemudahan dalam mengakses fasilitas kesehatan
8. Perusahaan Memberikan Pemberdayaan Kesehatan/Pendidikan Kepada Masyarakat

III. DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

1. Jumlah Penduduk di Daerah Ini Mengalami Peningkatan
2. Perusahaan Mengakibatkan Perubahan Kondisi Jalan Menjadi Lebih baik
3. Perusahaan Menambah Infrastruktur Jalan
4. Terjadi Penambahan Sarana Transportasi
5. Sarana Transportasi Dari Dan Ke Daerah Ini Sudah Lancar
6. Pemasaran Hasil-Hasil Produksi Dari Daerah Ini Cukup Baik
7. Jaringan Telekomunikasi ke Daerah Ini Menjadi Lebih Baik
8. Terjadi Kemudahan Komunikasi Dari dan Ke Daerah Ini

2.4 Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan dua menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan gambar setelah melalui proses tabulasi data.

BAB III

MIGAS DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

3.1 Migas dan Perekonomian Negara

Youngquist (1999) melakukan penelitian untuk menguji bagaimana sektor migas berperan terhadap perekonomian dan tingkat ketergantungan Negara tersebut terhadap hasil migas. Youngquist menyimpulkan bahwa perekonomian Negara-Negara yang memiliki sumber daya alam migas yang berlimpah cenderung tergantung kepada hasil migas. Selain itu dari hasil penelitiannya, Youngquist mengemukakan bahwa negara yang penerimaannya didominasi dari migas umumnya memiliki pertumbuhan penduduk yang pesat.

Berdasarkan temuan-temuan empiris tersebut Youngquist berkeyakinan bahwa hingga saat ini hasil migas dan peran sektor migas dalam menopang perekonomian negara atau daerah penghasil migas tidak tergantikan. Oleh karena itu Youngquist menyarankan agar seluruh negara di dunia merubah paradigma yaitu yang semula pembangunan dan kehidupan yang bergantung dari hasil dan produk migas menjadi pembangunan dan kehidupan tanpa migas.

Paradigma baru kehidupan tanpa migas yang disampaikan Youngquist itu disebut *post-petroleum paradigm*. Youngquist menilai bahwa pada saat ini ketergantungan Negara-Negara di dunia terhadap minyak mentah dan gas bumi terlalu besar. Youngquist memberikan contoh bagaimana dampak dari gejolak harga minyak

mentah dunia terhadap perekonomian. Bagi Negara bukan penghasil migas maka kenaikan harga minyak mentah akan memberatkan perekonomian mereka karena harus membelanjakan uangnya lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan energi. Sedangkan bagi Negara penghasil migas kenaikan harga minyak mentah merupakan tantangan karena mereka akan berusaha mengupayakan kenaikan produksi, sementara produksi minyak mentah dunia secara umum mengalami penurunan (Alfonsius, 2012).

Chandler (1994) melakukan penelitian tentang dampak peningkatan populasi terhadap kesejahteraan per kapita pada Negara penghasil minyak. Chandler menemukan hal yang sama, bahwa sejumlah Negara kaya minyak menggunakan penerimaan dan hasil dari minyak dengan tidak bijaksana. Chandler memberikan saran agar pemerintah bertindak bijak menginvestasikan hasil migas misalnya untuk rumah sakit, jalan, jembatan, bandara dan pembangkit listrik.

Dalam ruang lingkup yang lebih kecil yaitu tingkat provinsi, Harun (2000) pengajar di Universitas Riau juga memiliki kesimpulan yang sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya. Penelitiannya menyimpulkan bahwa Provinsi Riau sebagai penghasil minyak mentah terbesar di Indonesia, perekonomian mereka memiliki ketergantungan yang besar terhadap hasil dari sektor migas.

3.2 Peran Sektor Migas dalam Pertumbuhan Ekonomi

Sektor industri membutuhkan energi untuk memproduksi barang dan jasa. Sumber energi yang saat ini banyak digunakan adalah energi yang berasal dari sektor migas. Pada beberapa industri nampak bahwa sektor migas tidak saja digunakan sebagai sumber energi namun berperan juga sebagai bahan dasar dan bahan pendukung. Bahan bakar minyak dan gas bumi adalah penggerak utama untuk transportasi dan mobilisasi. Demikian juga dengan

pembangkit tenaga listrik yang mengandalkan bahan bakar minyak dan gas bumi.

Penjelasan dan pemahaman tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh sektor migas dapat dijelaskan melalui teori pertumbuhan yang dikembangkan oleh Solow (1956). Menurut Solow, secara tradisional pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni: kapital (tanah dan peralatan), manusia (tenaga kerja), dan teknologi. Solow berasumsi bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi bersifat *sustainable* atau berkelanjutan.

3.3 Pembangunan Berkelanjutan

Pertumbuhan adalah perubahan positif atau peningkatan perekonomian yang salah satunya dapat ditunjukkan dengan peningkatan output. Sedangkan pertumbuhan berkelanjutan dapat diartikan peningkatan output yang terjadi terus menerus dengan sumber daya yang tidak terbatas dan selalu tersedia ketika dibutuhkan. Pertumbuhan berkelanjutan atau selanjutnya juga disebut dengan pembangunan berkelanjutan secara konseptual disebarluaskan oleh *the World Commission on Enviromental and Development* (WCED) tahun 1987. Komisi ini mengeluarkan laporan yang berjudul "*Our Common Futures*". Laporan yang sangat terkenal ini dibuat oleh sekelompok ahli yang diketuai oleh Harlem Brundtland. Itulah sebabnya laporan ini lazim dikenal dengan sebutan Laporan Brundtland atau *The Brudtland Repot*. Pembangunan berkelanjutan dalam laporan tersebut didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi peluang bagi generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam konteks penggunaan sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan berarti pula peningkatan produksi dengan tidak mengabaikan lingkungan. Dengan demikian sumber daya yang dimiliki bersifat langgeng dan secara terus menerus bisa mendukung pembangunan ekonomi. Meskipun demikian para pengikut dan pendukung pembangunan serta ahli lingkungan harus sepakat bahwa kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup setara sehingga berada pada titik keseimbangan yang optimal (Saragih, 2000).

Pembangunan yang berkelanjutan mengasumsikan ketersediaan sumber daya atau material yang tiada henti. Bila ekologi tidak terjaga, terjadi kerusakan lingkungan, maka akan terjadinya pemusnahan sumber daya alam. Bila hal ini terjadi maka semakin besar peluang terjadinya kelangkaan sumber daya alam. Dalam kondisi semacam ini dapat dipastikan pembangunan berkelanjutan tidak dapat terjadi.

Secara lebih spesifik, penelitian tentang pembangunan berkelanjutan yang dikaitkan dengan energi dilakukan oleh Garg et. al. (2004). Penelitian ini mengamati tiga Negara yaitu China, India dan Afrika Selatan. Kesimpulan yang dihasilkan mempertegas bahwa energi, terutama yang bersumber dari *fuel fosil* memegang peranan penting dalam menentukan produktivitas. Produktivitas merupakan faktor pendorong terjadinya pembangunan dan sekaligus menjadi kendala untuk terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

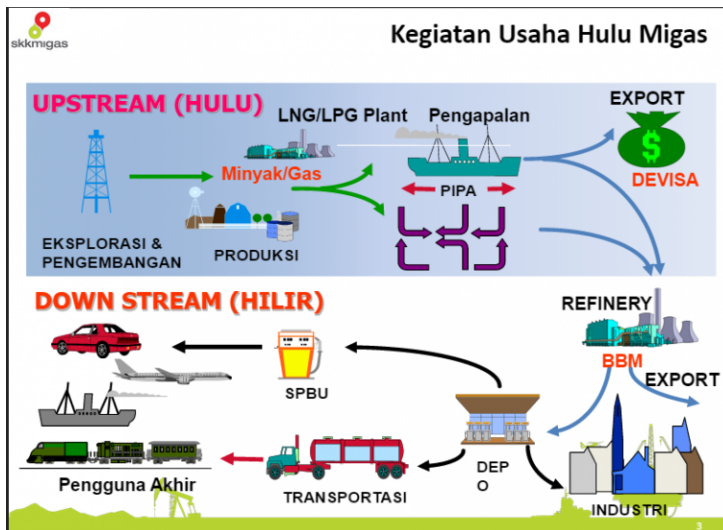
Garg et.al. menyampaikan bahwa pertanian dan migas adalah sumber ekonomi yang diperoleh dari alam, namun keduanya memiliki sifat yang bertentangan. Pertanian merupakan sumber daya alam yang terbarukan, sedangkan migas adalah sumber daya alam tak terbarukan. Pertanian adalah sumber daya alam yang memiliki sifat sebagai sumber daya yang berkelanjutan dan dapat terus diperbaharui, sementara migas sebaliknya. Migas pada suatu saat akan habis dan tidak mungkin lagi untuk dibuat atau dibentuk ulang.

Namun, di sisi lain sumber daya alam migas memiliki kemampuan ekonomis yang tinggi serta memiliki kemampuan untuk bekerja lebih efisien jika dibandingkan dengan pertanian. Tetapi mengandalkan sumber daya alam migas sebagai pendukung pembangunan untuk sepanjang masa jelas bukan pilihan yang tepat. Lebih dari itu, pilihan tersebut juga tidak mungkin sebab ketersediaan sumber daya alam migas sifatnya terbatas. Menurut perkiraan cadangan minyak Indonesia tidak lama lagi akan habis. Jika produksi minyak konstan rata-rata 1 juta barel per hari, dan tidak ditemukan cadangan minyak mentah yang baru, serta tidak ditemukan teknologi baru yang mampu mengangkat sisa-sisa cadangan, maka dalam 15 tahun lagi cadangan minyak mentah tersebut ada akan habis. Sedangkan untuk gas bumi dengan asumsi produksi tetap dan konstan seperti sekarang, maka cadangan gas akan mampu bertahan hingga 50 tahun ke depan.

Salah satu keuntungan dari pertanian dan produk pertanian adalah sifatnya yang ramah lingkungan. Konotasi terbalik jika hal ini disejajarkan dengan sektor migas. Kegiatan usaha migas, proses dan pengolahan migas, termasuk produk migas dicurigai sebagai salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Oleh karena itu pengembangan sektor migas hendaknya selalu diikuti dengan pengawasan dan analisis dampak lingkungan (amdal) yang ketat. Tidak saja dalam perencanaannya yang sudah harus mengikuti ketentuan amdal yang berlaku, namun juga dalam pelaksanaannya. Setiap tahapan diawasi dan harus mematuhi rancangan amdal yang sudah dibuat dan yang telah disetujui oleh pihak berwenang. Bahkan dalam kasus khusus diperlukan pendampingan oleh konsultan eksogen. Kasus lumpur panas Lapindo cukup memberikan bukti perlunya perencanaan dan pelaksanaan eksplorasi migas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.4 Peran Sektor Hulu Migas terhadap Perekonomian Indonesia

Penerimaan Indonesia dari sektor migas selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2011 dan 2012 Indonesia memperoleh pendapatan sebesar USD 35,79 miliar dan USD 36,13 miliar, melebihi target APBN yang telah ditetapkan yakni USD 32,40 miliar dan USD 33,48 miliar. Tiga tahun berikutnya, meski secara prosentase pencapaian target menurun, sumbangan migas terhadap perekonomian Negara masih sangat besar. Hal itu menunjukkan bahwa sektor migas selama ini telah memberikan peran penting dan strategis bagi pembangunan nasional.



Sumber: SKK Migas

Gambar 3.1 Kegiatan Usaha Hulu Migas

Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia dihadapkan pada tantangan bagaimana memenuhi kebutuhan energi domestik yang kian meningkat. Impor menjadi salah satu langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Agar volume impor dapat dikurangi maka diperlukan laju investasi yang

cepat sehingga kebutuhan domestik dapat terpenuhi. Jika diperhatikan, tahun 2012 investasi sektor hulu migas cukup menggembirakan. Angka investasi yang berada pada USD 15,57 miliar menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya berkisar USD 14,02 miliar. Peluang investasi di sektor hulu migas yang sangat besar semakin menambah optimisme untuk percepatan peningkatan ekonomi nasional.

Tantangan lain yang dihadapi sektor hulu migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri adalah semakin besarnya ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), sementara produksi minyak dalam negeri tidak sebanding dengan konsumsi minyak yang terus melonjak.

Tingginya permintaan minyak dalam negeri di tengah semakin berkurangnya cadangan minyak menuntut pemerintah untuk melakukan impor sebagai upaya pemenuhan energi di dalam negeri, meskipun hal tersebut kurang sejalan dengan semangat ketahanan energi nasional. Untuk mengurangi kesenjangan antara produksi dan konsumsi minyak dalam negeri ini, ke depan diharapkan pemanfaatan energi alternatif selain minyak dapat dioptimalkan, sehingga ketergantungan terhadap minyak bumi dapat sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan.

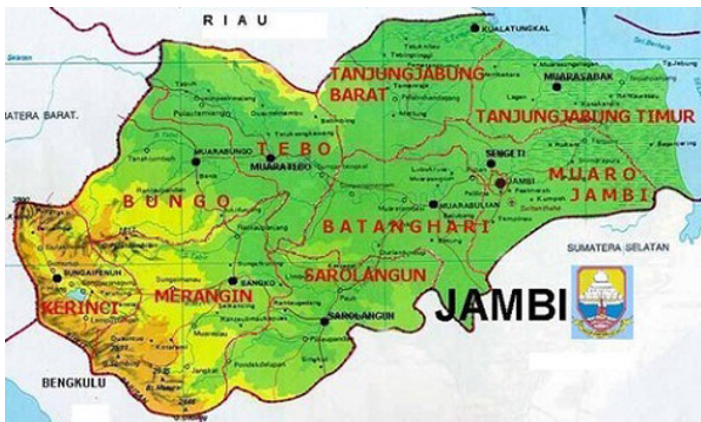
BAB IV

PROVINSI JAMBI DAN

INDUSTRI MIGAS

4.1 Kondisi Geografis Provinsi Jambi

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara $0^{\circ} 45'$ sampai $2^{\circ} 45'$ lintang selatan dan antara $101^{\circ} 10'$ sampai $104^{\circ} 55'$ bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau, sebelah timur dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu.



Sumber: www.jambiprov.go.id

Gambar 4.1 Peta Provinsi Jambi

Luas wilayah Provinsi Jambi 53.435 km², yang terdiri dari:

1. Kabupaten Kerinci 3.805,5 km² (7,13%)
2. Kabupaten Merangin 6.380 km² (11,94%)
3. Kabupaten Sarolangun 7.820 km² (14,63%)
4. Kabupaten Batanghari 4.983 km² (9,33%)
5. Kabupaten Muaro Jambi 6.147 km² (11,5%)
6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 5.330 km² (9,97%)
7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4.870 km² (9,11%)
8. Kabupaten Tebo 6.340 km² (11,86%)
9. Kabupaten Bungo 7.160 km² (13,40%)
10. Kota Jambi 205 km² (0,38%)
11. Kota Sungai Penuh 391.5 km² (0,73%)

4.2 Kondisi Perekonomian

Kegiatan perekonomian di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tumbuh karena berbagai macam kegiatan ekonomi yang timbul di daerah tersebut. Untuk mengamati dan menganalisa ekonomi suatu region, kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam 17 kategori/lapangan usaha, dimana pengelompokkan tersebut menggambarkan sektor-sektor ekonomi yang menentukan dan berpengaruh dalam kehidupan ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi berturut-turut dalam kurun 2011 s.d. 2015 adalah 7,86 %; 7,03 %; 6,84 %; 7,35 % dan 4,21 %. Gambaran keadaan ekonomi Provinsi Jambi ini adalah merupakan resultan semua perubahan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi setiap kabupaten dan kota, sehingga semua perubahan di kabupaten/kota secara agregatif menggambarkan perubahan yang terjadi di Provinsi Jambi.

4.2.1 PDRB Kabupaten/Kota

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran dari nilai tambah yang timbul akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu region. Data PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimiliki melalui suatu proses produksi. Oleh karena itu besar dan struktur PDRB sangat tergantung kepada sumber daya alam dan faktor produksinya. Adanya keterbatasan dalam penyediaan dan kemampuan memberdayakan faktor-faktor tersebut menyebabkan struktur PDRB yang bervariasi antar daerah.

Sejak tahun 2010, peringkat PDRB Kab/Kota di Provinsi Jambi hampir tidak mengalami perubahan signifikan. Kabupaten Tanjung Jabung Barat menduduki urutan pertama, diikuti dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi. Namun pada tahun 2014, peringkat PDRB Kota Jambi naik ke urutan kedua, menggeser posisi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berkurangnya produksi gas bumi Kabupaten Tanjung Jabung Timur di tengah turunnya harga minyak dunia diindikasikan sebagai penyebabnya.

Sejak tahun 2011 sampai 2015 Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki kontribusi PDRB tertinggi masing-masing sebesar 21,08 % (2011); 20,8 % (2012); 20,66 % (2013); 20,1 % (2014) dan 19,02 % (2015). Sebagai penyumbang terkecil terhadap perekonomian Provinsi Jambi adalah Kota Sungai Penuh, yang hanya berkontribusi sebesar 3,22% pada tahun 2015. Secara lengkap kontribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku dengan Migas

Kabupaten/ Kota	2011		2012		2013		2014*		2015**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kerinci	4,07	(10)	4,1	(10)	4,13	(10)	4,31	(10)	4,56	(10)
Merangin	6,49	(8)	6,53	(8)	6,51	(8)	6,56	(8)	6,8	(8)
Sarolangun	7,29	(7)	7,3	(7)	7,25	(7)	7,18	(7)	7,22	(7)
Batang Hari	7,63	(6)	7,57	(6)	7,52	(6)	7,59	(6)	7,79	(6)
Muaro Jambi	10,34	(4)	10,16	(4)	10,42	(4)	10,63	(4)	11,01	(4)
Tanjab Timur	13,75	(2)	13,52	(2)	13,33	(2)	12,98	(3)	11,49	(3)
Tanjab Barat	21,08	(1)	20,8	(1)	20,66	(1)	20,10	(1)	19,02	(1)
Tebo	6,40	(9)	6,2	(9)	6,33	(9)	6,38	(9)	6,72	(9)
Bungo	7,71	(5)	8,31	(5)	8,2	(5)	8,16	(5)	8,4	(5)
Kota Jambi	12,39	(3)	12,61	(3)	12,74	(3)	13,12	(2)	13,77	(2)
Kota Sungai Penuh	2,84	(11)	2,9	(11)	2,9	(11)	2,98	(11)	3,22	(11)
Total	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

Keterangan: -angka dalam tanda kurung menunjukkan peringkat

• Angka sementara ** Angka sangat sementara

Sumber: Jambi Dalam Angka (2015)

Jika dilihat per kategorinya, kontribusi terbesar dipegang oleh kategori pertambangan dan penggalian terutama subkategori pertambangan migas yang menjadi unggulan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.

4.2.2 Dana Bagi Hasil Migas

Pemerintah mengalokasikan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) sektor migas sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku yakni, Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada Pasal 19 ayat 2 dan 3 UU tersebut dijelaskan secara terperinci terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Pemerintah Daerah.

DBH Minyak Bumi sebesar 15,5% dibagi dengan rincian, 3% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 6% Kabupaten/Kota penghasil, 6% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan dan sisanya sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. Sementara itu untuk DBH Gas Bumi sebesar 30,5% dibagi dengan rincian, 6% Kabupaten/Kota yang bersangkutan, 12% untuk Kabupaten/Kota penghasil, 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan dan sisanya sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

Walaupun Provinsi Jambi sendiri bukan disebut sebagai daerah penghasil migas, di wilayahnya terdapat 7 (tujuh) Kab/Kota yang menjadi penghasil migas, yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, dan Kota Jambi.

Selanjutnya, sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab sebelumnya, kajian ini akan lebih difokuskan pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana wilayah tersebut beroperasi KKKS yaitu Petrochina Jabung Limited dengan dengan produksi minyak dan gas yang cukup besar.

Tabel 4.2 menunjukkan realisasi pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana DBH Migas pada tahun 2012 menyumbang hampir 30% dari keseluruhan pendapatan, 27,57% pada 2013, dan 23,2% pada 2014. Walaupun terjadi penurunan prosentase dari 2012 sampai 2014, tidak dapat dipungkiri bahwa sektor migas menjanjikan pendapatan yang cukup besar bagi sumber pendapatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel 4.2
Realiasi Pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Uraian	2012	2013	2014
pendapatan asli daerah	29,435,684.06	29,812,142.17	34,636,089.95
dana perimbangan	718,684,301.09	809,458,361.82	784,452,859.94
- bagi hasil pajak	100,977,628.78	117,203,020.99	95,860,485.59
- bagi hasil SDA	242,913,969.31	253,802,788.83	216,297,078.35
- dana alokasi umum	356,323,443.00	430,383,112.00	455,996,416.00
- dana alokasi khusus	18,469,260.00	8,069,440.00	16,298,880.00
lain lain	61,659,886.15	81,388,295.88	113,073,280.91
TOTAL	809,779,871.30	920,658,799.86	932,162,230.80

Sumber: Tanjung Jabung Timur Dalam Angka (2015)

4.3 Kependudukan dan Tenaga Kerja

Jumlah penduduk Provinsi Jambi tahun 2014 tercatat sebanyak 3.344.421 jiwa, meningkat dari tahun 2013 dengan jumlah penduduk sebanyak 3.317.034. Prosentase pertumbuhan penduduk dalam kurun 2010-2014 adalah 0,83% (Tabel 4.3).

Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami kenaikan pada tahun 2014 dibandingkan 2013 yaitu dari 64,75% menjadi 70,3%, yang berarti bahwa dari 100 penduduk usia kerja pada tahun 2014 terdapat 70 orang sudah terlibat dan siap terjun ke dalam dunia kerja. Dari total 108.644 penduduk angkatan kerja tersebut, terdapat sekitar 106.765 penduduk yang bekerja, dengan nilai tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 1,73%. Secara rinci, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersaji pada Tabel 4.4.

Tabel 4.3**Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jambi**

Wilayah	Penduduk Provinsi Jambi (Jiwa)				
	2010	2011	2012	2013	2014
PROVINSI JAMBI	3092265	3169814	3169814	3317034	3344421
KERINCI	229495	235251	235797	236762	234003
MERANGIN	333206	341563	350062	358530	360187
SAROLANGUN	246245	252421	259963	267549	272203
BATANGHARI	241334	247386	252731	258016	257201
MUARO JAMBI	342952	351553	363994	376619	388323
TANJUNG JABUNG TIMUR	205272	210420	211057	212218	212084
TANJUNG JABUNG BARAT	278741	285731	293594	301469	304899
TEBO	297735	305202	313420	321641	324919
BUNGO	303135	310737	320300	329934	336320
KOTA JAMBI	531857	545193	557321	569331	568062
KOTA SUNGAI PENUH	82293	84357	84575	84965	86220

Sumber: Jambi Dalam Angka 2015

Tabel 4.4 Angkatan Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Uraian	2012	2013	2014
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,96	64,75	70,30
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,12	3,53	1,73
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	97,88	96,47	98,27

Sumber: Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2015

4.4 Profil Wilayah Kerja Migas di Provinsi Jambi

Eksplorasi minyak bumi di Provinsi Jambi terjadi sejak tahun 1920 dimana dua perusahaan milik kongsi Belanda dan Amerika Serikat; Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) dan NV Nederlands Indische Aardolie Maatschappij (NIAM) mengeksploitasi daerah Bajubang, Tempino dan Kenali Asam. Pada tahun 1957, pemerintah Indonesia mengambil alih kegiatan hulu migas dari perusahaan kongsi Belanda dan AS tersebut kemudian mendirikan Permiri (Perusahaan Minyak Republik Indonesia) sebagai perusahaan minyak pertama di Indonesia kemudian berganti nama menjadi Pertamina seperti yang sekarang kita ketahui (Nurul Fahmi, 2012). Masa kejayaan Pertamina Jambi terjadi pada tahun 1970 hingga awal tahun 1990an, dimana indikator kejayaan produksi minyak ditandai dengan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang membaik. Pada bulan Februari 1993 dilakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama (*Production Sharing Contract*) Santa Fe dan Pertamina sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk mengeksplorasi Blok Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Januari 1995 pengeboran sumur North Geragai 1 sudah langsung menemukan minyak dan gas, hingga pada Agustus 1997 Blok Jabung mulai memasuki tahap eksploitasi migas. Selanjutnya, pada tahun 2002 Blok Jabung diakuisisi oleh Petrochina International Jabung Ltd yang beroperasi hingga saat ini.

BAB V

ANALISIS DAMPAK KEGIATAN HULU MIGAS DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI

5.1 Hasil Pengumpulan Data

Pusdatin Kementerian ESDM bekerja sama dengan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jambi, BAPPEDA Provinsi Jambi, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner kepada tokoh masyarakat dan warga yang dianggap merepresentasikan persepsi masyarakat di wilayah sekitar kerja migas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta para pemangku jabatan di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten.



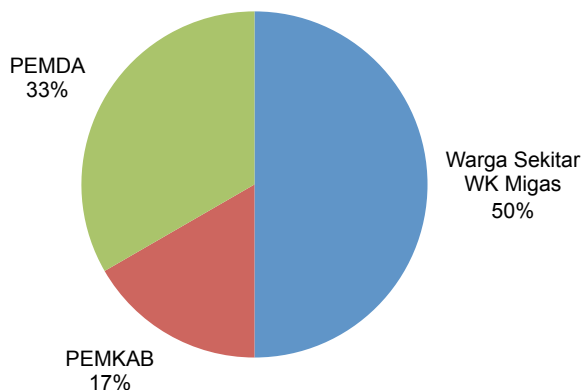
Gambar 5.1 Dokumentasi Penyebaran Kuisisioner

Profil Responden

Pada bagian ini akan dibahas mengenai profil responden dalam kegiatan survei Dampak Kegiatan Hulu Migas terhadap Perekonomian di sekitar Wilayah Kerja Migas. Profil responden ini umumnya hanya dianggap sebagai data kependudukan. Beberapa data demografi yang bermanfaat untuk mengetahui kondisi responden adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, pekerjaan, besar penghasilan sebelum dan sesudah ada aktivitas industri migas.

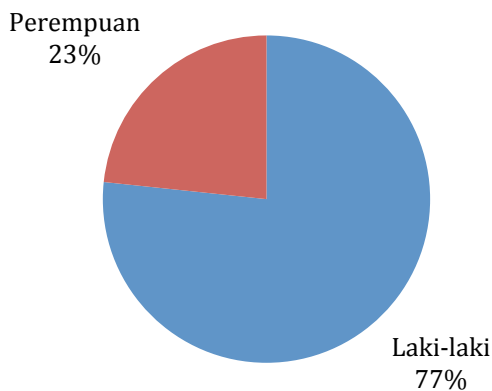
Responden dalam survei ini merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah kerja migas dan masyarakat yang bekerja di instansi pemerintah (PEMDA dan PEMKAB). Hasil survei dalam Grafik 5.1 menunjukkan bahwa persentase responden yang berasal dari warga sekitar wilayah kerja migas dan masyarakat yang bekerja di instansi pemerintah cenderung sama, yaitu warga sekitar wilayah kerja migas (50%) dan masyarakat yang bekerja di instansi pemerintah (50%).

Grafik 5.1 Sebaran Responden



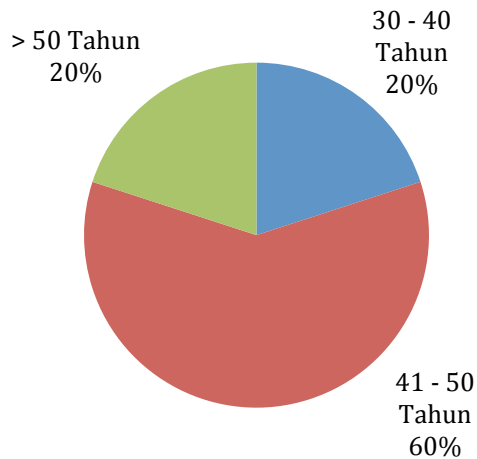
Responden dalam survei ini merupakan masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan berusia minimal 30 tahun. Hasil survei dalam Grafik 5.2 menunjukkan bahwa mayoritas responden (77%) berjenis kelamin laki-laki. Hanya 23% responden berjenis kelamin perempuan.

Grafik 5.2 Sebaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



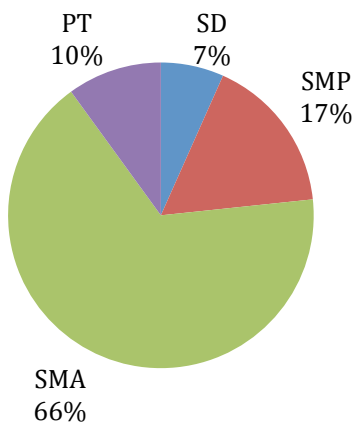
Responden dalam survei ini merupakan masyarakat yang memiliki usia minimal 30 tahun. Usia responden dalam survei ini dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu usia 30 sampai dengan 40 tahun, usia 41 sampai dengan 50 tahun, dan usia lebih dari 50 tahun. Jika dilihat berdasarkan usia, mayoritas responden (60%) memiliki usia antara 41 sampai dengan 50 tahun (Grafik 5.3).

Grafik 5.3 Sebaran Responden Berdasarkan Kelompok Usia



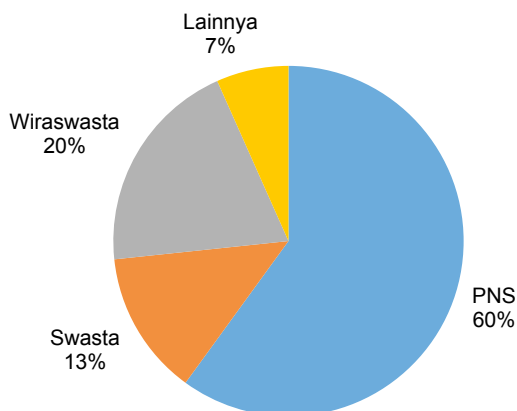
Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, maka tingkat pendidikan dalam survei ini dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi (PT). Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden (67%) memiliki tingkat pendidikan SMA. Hanya 6% responden memiliki tingkat pendidikan SD (Grafik 5.4).

Grafik 5.4 Sebaran Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan



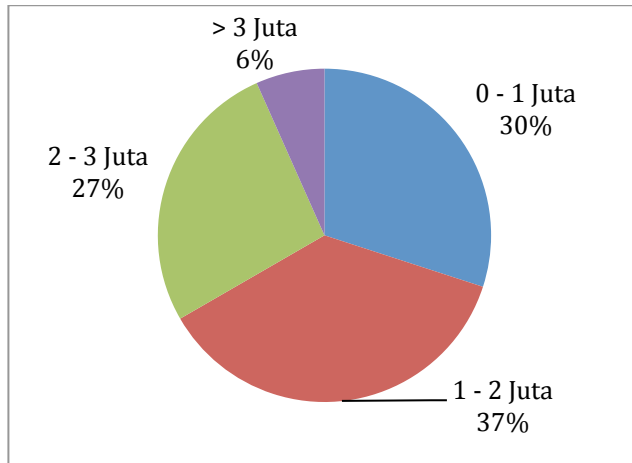
Dalam survei ini pekerjaan responden dibagi atas empat kategori. Kategori pertama adalah masyarakat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polisi/ABRI/TNI. Kategori kedua adalah masyarakat yang bekerja sebagai pegawai swasta. Kategori ketiga adalah masyarakat yang berwiraswasta. Kategori keempat adalah lainnya. Masyarakat yang termasuk dalam kategori lainnya adalah masyarakat yang memiliki jenis pekerjaan lainnya di luar kategori pertama sampai dengan ketiga. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan PNS (60%). Jumlah responden terendah berasal dari kategori pekerjaan lainnya yaitu 7% (Grafik 5.5).

Grafik 5.5 Sebaran Responden Berdasarkan Pekerjaan

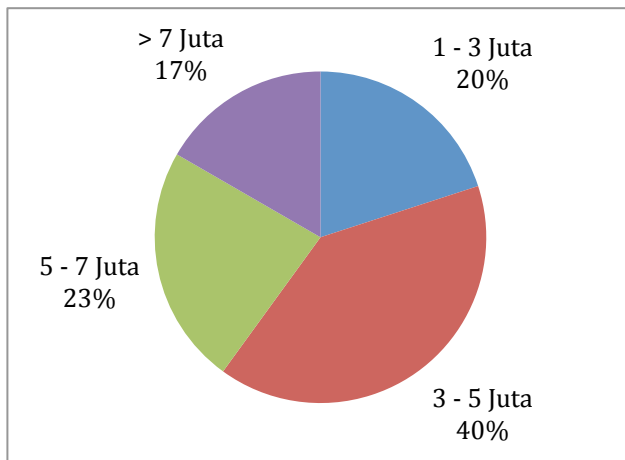


Dampak ekonomi yang dirasakan dari adanya kegiatan hulu migas di sekitar wilayah kerja migas dapat diidentifikasi dari besarnya penghasilan yang diterima sebelum dan sesudah adanya kegiatan migas. Sebaran responden berdasarkan penghasilan yang diperoleh sebelum dan sesudah ada kegiatan migas dapat dilihat pada Grafik 5.6a dan 5.6b. Gambar 5.6a menunjukkan bahwa mayoritas responden (63%) sebelum ada kegiatan migas memiliki penghasilan antara 1 sampai dengan 3 juta. Persentase responden yang memiliki penghasilan 1 sampai dengan 3 juta mengalami penurunan menjadi 20% setelah ada kegiatan migas (Grafik 5.6b). Selain itu, persentase responden yang memiliki penghasilan di atas 3 juta sebelum adanya kegiatan migas hanya 7%. Persentase tersebut meningkat setelah adanya kegiatan migas menjadi 40%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kegiatan migas dapat meningkatkan penghasilan yang diterima oleh masyarakat.

Grafik 5.6a Sebelum Ada Kegiatan Migas



Grafik 5.6b Sesudah Ada Kegiatan Migas

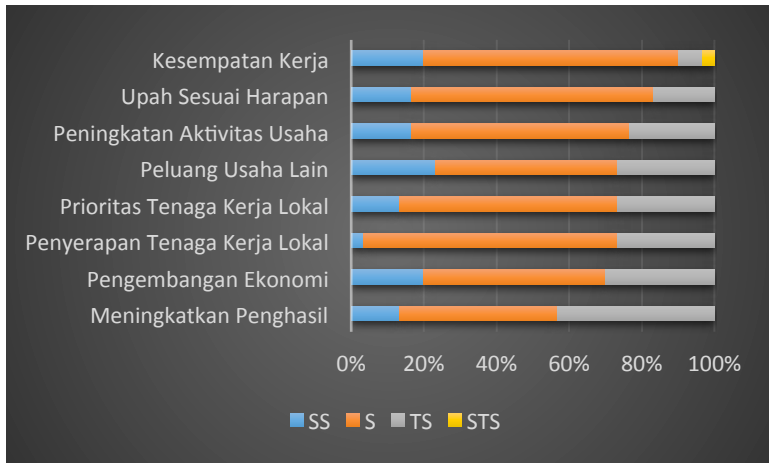


5.2 Dampak Ekonomi di Sekitar Wilayah Kerja Migas

Dampak ekonomi yang dirasakan setelah adanya kegiatan hulu migas di sekitar wilayah kerja migas diidentifikasi berdasarkan persepsi masyarakat terhadap delapan pernyataan. Persepsi masyarakat terhadap dampak ekonomi yang dirasakan setelah adanya kegiatan hulu migas diukur dengan menggunakan skala likert, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS); Setuju (S); dan Sangat Setuju (SS).

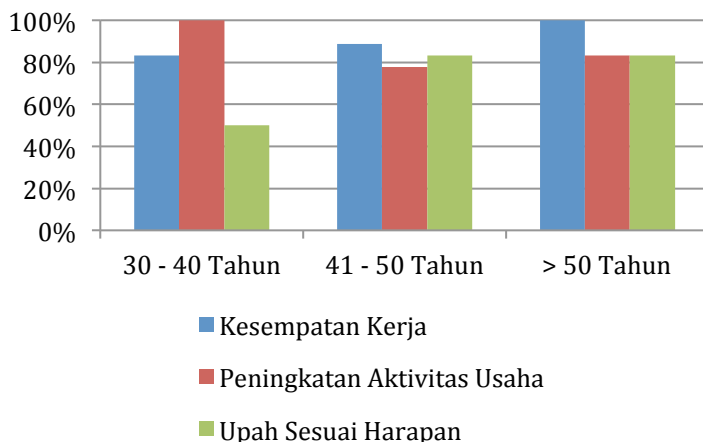
Dampak ekonomi yang diidentifikasi adalah kesempatan kerja; upah sesuai harapan; peningkatan aktivitas usaha; peluang usaha lain; prioritas tenaga kerja lokal; penyerapan tenaga kerja lokal; pengembangan ekonomi masyarakat; meningkatkan penghasilan responden. Grafik 5.7 menunjukkan bahwa secara umum lebih dari separuh masyarakat setuju (setuju dan sangat setuju) bahwa adanya kegiatan migas memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat. Sementara itu, dampak ekonomi yang cenderung paling banyak dirasakan oleh masyarakat adalah bidang kesempatan kerja. Lebih dari 75% masyarakat setuju bahwa adanya kegiatan migas memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja migas dengan rincian 70% mengakui setuju dan 20% mengakui sangat setuju. Selain itu, dua dampak ekonomi yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat adalah upah sesuai harapan dan peningkatan aktivitas usaha. Pada dampak ekonomi berupa upah sesuai harapan, 67% masyarakat mengakui setuju dan 17% masyarakat mengakui sangat setuju mengenai dampak tersebut. Sedangkan dampak berupa peningkatan aktivitas usaha, terdapat 60% masyarakat mengakui setuju dan 17% masyarakat mengakui sangat setuju.

Grafik 5.7 Dampak Ekonomi



Selanjutnya, persepsi masyarakat terhadap dampak ekonomi yang dirasakan setelah adanya kegiatan hulu migas diidentifikasi melalui tiga dampak yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat dan diklasifikasikan berdasarkan usia. Persepsi masyarakat terhadap dampak ekonomi yang dirasakan setelah adanya kegiatan migas diklasifikasikan berdasarkan usia. Grafik 5.8 memperlihatkan kesempatan kerja merupakan dampak yang paling banyak dirasakan setelah adanya kegiatan migas oleh kelompok usia 41 sampai dengan 50 tahun dan kelompok usia di atas 50 tahun. Sedangkan di kalangan usia 30 sampai dengan 40 tahun, peningkatan aktivitas usaha menjadi dampak ekonomi yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat setelah adanya kegiatan migas.

Grafik 5.8 Tiga Dampak Ekonomi Yang Paling Dirasakan Setelah Adanya Kegiatan Hulu Migas

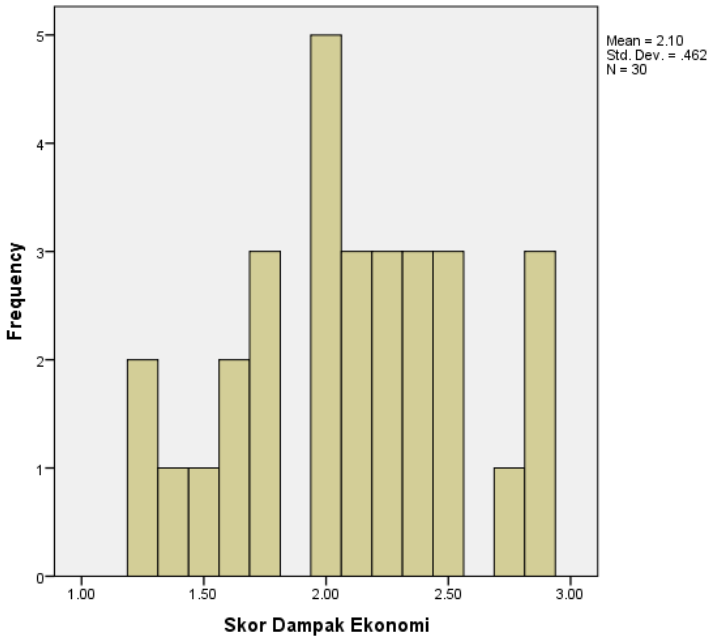


Setelah mengetahui dampak ekonomi yang paling dirasakan oleh masyarakat setelah adanya kegiatan hulu migas, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menghitung skor dampak ekonomi untuk masing-masing masyarakat. Dalam penelitian ini, skor dampak ekonomi menggambarkan total jawaban yang diberikan oleh responden dibagi dengan jumlah pernyataan yang digunakan untuk mengukur dampak ekonomi. Atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Skor dampak ekonomi} = \frac{\text{Total jawaban responden}}{\text{Jumlah pernyataan}} \quad (\text{Persamaan 1})$$

Hasil survei menunjukkan bahwa skor dampak ekonomi bervariasi dari 1,25 sampai dengan 2,88. Semakin kecil skor dampak ekonomi yang dimiliki suatu masyarakat, maka semakin besar dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat tersebut setelah adanya kegiatan migas. Dengan menggunakan histogram dapat diperoleh informasi mengenai sebaran dari skor dampak ekonomi yang dihasilkan. Adapun sebaran dari skor tersebut dapat dilihat pada Grafik 5.9.

Grafik 5.9 Skor Dampak Ekonomi



Berdasarkan sebaran skor dampak ekonomi yang ditunjukkan pada gambar di atas, maka nilai tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok. Ketiga kelompok tersebut dibuat berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Masyarakat dimasukkan ke dalam kelompok 1 apabila skor dampak ekonomi tersebut bernilai tidak kurang dari 1,25. Masyarakat yang masuk dalam kategori ini dikatakan sebagai kelompok yang merasakan dampak ekonomi yang tinggi setelah adanya kegiatan migas.
- 2) Masyarakat dimasukkan ke dalam kelompok 2 apabila skor dampak ekonomi tersebut bernilai antara 1,26 sampai dengan 2,50. Masyarakat yang masuk dalam kategori ini dikatakan sebagai kelompok yang merasakan dampak ekonomi yang cukup setelah adanya kegiatan migas.

- 3) Masyarakat dimasukkan ke dalam kelompok 3 apabila skor dampak ekonomi tersebut bernilai lebih dari 2,50. Masyarakat yang masuk dalam kategori ini dikatakan sebagai kelompok yang merasakan dampak ekonomi yang rendah setelah adanya kegiatan migas.

Tabel 5.1 memperlihatkan tingkat dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat setelah adanya kegiatan migas. Tabel tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden (80%) merasakan adanya kegiatan migas memberikan dampak ekonomi yang cukup. Hanya 2% responden yang menyatakan bahwa adanya kegiatan migas memberikan dampak ekonomi yang tinggi.

Tabel 5.1 Tingkat Dampak Ekonomi

Tingkat Dampak Ekonomi	Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Tinggi	2	6.7	6.7
Cukup	24	80.0	86.7
Rendah	4	13.3	100.0
Total	30	100.0	

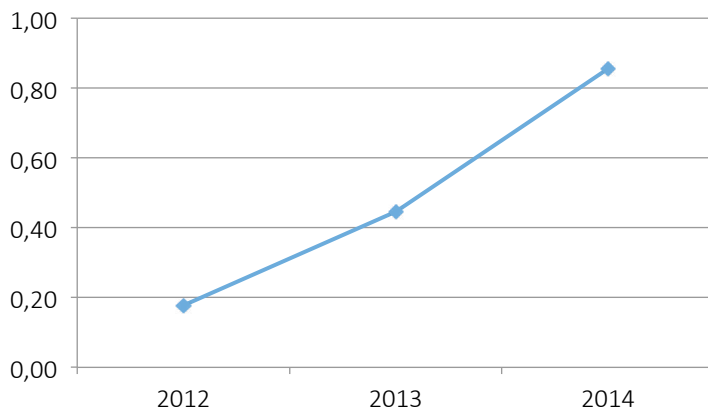
Hasil survei mengenai persepsi masyarakat terhadap dampak ekonomi dari kegiatan migas menunjukkan bahwa adanya kegiatan migas cukup memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat. Akan tetapi, data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi kabupaten Tanjung Jabung Timur cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

Adapun delapan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase pertumbuhan ekonomi (dengan migas);
- 2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK);
- 3) Persentase sektor sekunder terhadap PDRB;
- 4) Persentase sektor tersier terhadap PDRB;
- 5) Persentase PDRB kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap PDRB Provinsi Jambi;
- 6) Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah;
- 7) Persentase Rumah Tangga (RT) yang memiliki penghasilan kurang dari Rp 200.000,- per bulan;
- 8) Persentase penduduk miskin.

Delapan indikator tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan Analisis Komponen Utama. Analisis Komponen Utama digunakan untuk mengukur skor kinerja pembangunan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Skor kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada Grafik 5.10. Hasil analisis menunjukkan bahwa skor kinerja pembangunan ekonomi kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Perekonomian Tanjung Jabung Timur terutama ditopang oleh subsektor pertambangan, minyak, dan gas bumi. Hal ini dapat dilihat dari persentase nilai tambah yang dihasilkan oleh subsektor tersebut. Pada tahun 2012, sebesar 61,74% nilai tambah yang dihasilkan oleh kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh subsektor pertambangan, minyak, dan gas bumi. Selain itu, skor kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2012 bernilai 0,18. Skor tersebut mengalami peningkatan sebesar 79% pada tahun 2014 menjadi 0,86. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kegiatan migas memberikan dampak ekonomi yang signifikan kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja migas.

Grafik 5.10 Skor Kinerja Pembangunan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2014



Sumber: diolah dari data BPS

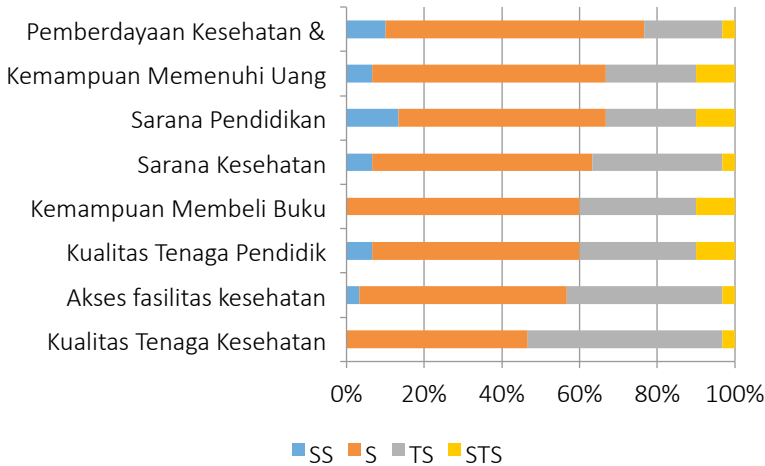
5.3 Dampak Sosial (Pembangunan Sumber Daya Manusia)

Adanya kegiatan hulu migas di sekitar wilayah kerja migas tidak hanya memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat, tetapi juga dampak sosial. Dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat setelah adanya kegiatan migas diidentifikasi berdasarkan persepsi masyarakat terhadap delapan pernyataan dengan menggunakan skala likert. Adapun delapan pernyataan yang digunakan untuk mengukur dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat setelah adanya kegiatan migas adalah kualitas tenaga kesehatan, akses fasilitas kesehatan, kualitas tenaga pendidik, kemampuan membeli buku sekolah, sarana kesehatan, sarana pendidikan, kemampuan memenuhi uang sekolah, dan pemberdayaan kesehatan dan pendidikan.

Dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat setelah adanya kegiatan hulu migas dapat dilihat pada Grafik 5.11 yang menunjukkan bahwa dampak sosial yang paling banyak dirasakan

oleh masyarakat adalah pemberdayaan kesehatan dan pendidikan. Lebih dari 75% masyarakat merasakan dampak sosial tersebut. Sementara itu, dampak sosial yang paling sedikit dirasakan oleh masyarakat adalah kualitas tenaga kesehatan. Tidak lebih dari 50% masyarakat yang merasakan dampak sosial berupa peningkatan kualitas tenaga kesehatan setelah adanya kegiatan migas.

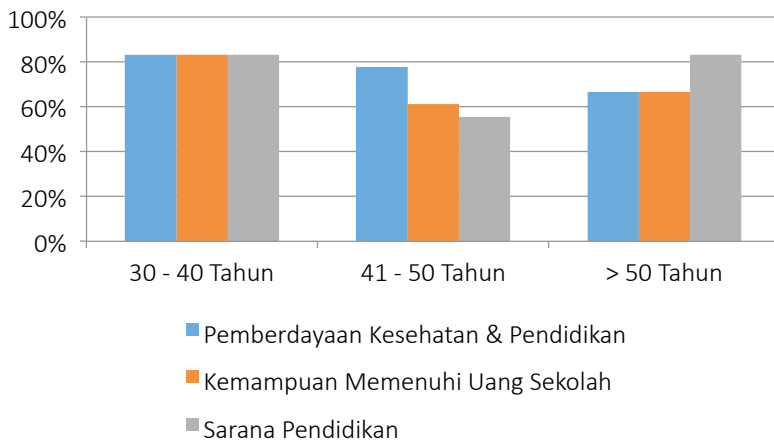
Grafik 5.11 Dampak Sosial



Selanjutnya, persepsi masyarakat terhadap dampak sosial yang dirasakan setelah adanya kegiatan migas diidentifikasi melalui tiga dampak sosial yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat dan diklasifikasikan berdasarkan usia. Klasifikasi masyarakat berdasarkan usia memperlihatkan bahwa tiga dampak sosial yang paling banyak dirasakan di semua kelompok usia adalah pemberdayaan kesehatan dan pendidikan, kemampuan memenuhi uang sekolah, dan sarana pendidikan (Grafik 5.12). Namun demikian, grafik tersebut juga memperlihatkan bahwa persentase tertinggi masyarakat yang merasakan ketiga dampak sosial tersebut pada setiap kelompok usia berbeda. Pemeberdayaan kesehatan dan

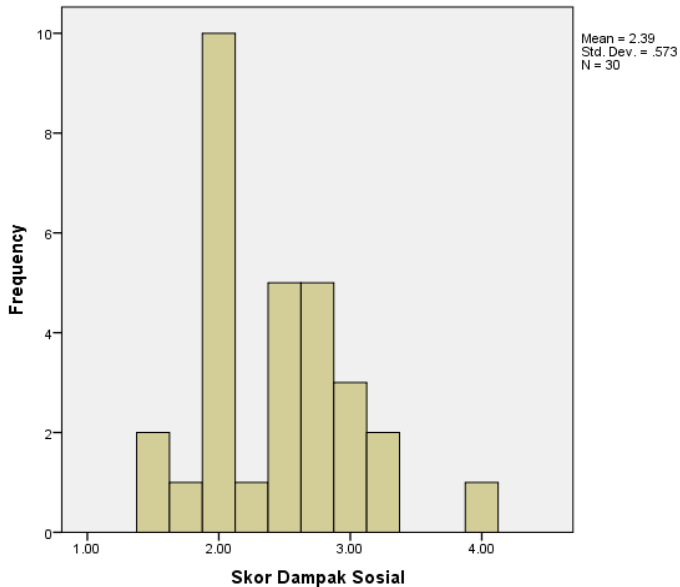
pendidikan menjadi dampak sosial yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat pada kelompok usia 30 tahun sampai dengan 50 tahun. Sementara itu, sarana pendidikan menjadi dampak sosial yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat yang berusia di atas 50 tahun.

Grafik 5.12 Tiga Dampak Sosial Yang Paling Dirasakan Setelah Adanya Kegiatan Hulu Migas



Setelah mengetahui dampak sosial yang paling dirasakan oleh masyarakat setelah adanya kegiatan hulu migas, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menghitung skor dampak sosial untuk masing-masing masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa skor dampak sosial memiliki nilai antara 1,50 sampai dengan 4,00. Prinsip skor dampak sosial sama dengan skor dampak ekonomi, yaitu semakin kecil skor dampak sosial yang dimiliki suatu masyarakat maka semakin besar dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat tersebut setelah adanya kegiatan migas. Dengan menggunakan histogram dapat diperoleh informasi mengenai sebaran dari skor dampak sosial yang dihasilkan. Adapun sebaran dari skor tersebut dapat dilihat pada Grafik 5.13.

Grafik 5.13 Skor Dampak Sosial



Berdasarkan sebaran skor dampak sosial yang ditunjukkan pada gambar di atas, maka nilai tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok. Ketiga kelompok tersebut dibuat berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Masyarakat dimasukkan ke dalam kelompok 1 apabila skor dampak sosial tersebut bernilai tidak kurang dari 1,50. Masyarakat yang masuk dalam kategori ini dikatakan sebagai kelompok yang merasakan dampak sosial yang tinggi setelah adanya kegiatan migas.
- 2) Masyarakat dimasukkan ke dalam kelompok 2 apabila skor dampak sosial tersebut bernilai antara 1,50 sampai dengan 3,00. Masyarakat yang masuk dalam kategori ini dikatakan sebagai kelompok yang merasakan dampak sosial yang cukup setelah adanya kegiatan migas.

- 3) Masyarakat dimasukkan ke dalam kelompok 3 apabila skor dampak sosial tersebut bernilai lebih dari 3,00. Masyarakat yang masuk dalam kategori ini dikatakan sebagai kelompok yang merasakan dampak sosial yang rendah setelah adanya kegiatan migas.

Tingkat dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat setelah adanya kegiatan migas dapat dilihat pada Tabel 5.2. Tabel tersebut menunjukkan bahwa adanya kegiatan migas memberikan dampak sosial yang cukup masyarakat di sekitar wilayah kerja migas. Lebih dari 75% masyarakat merasakan dampak sosial tersebut. Sementara itu, hanya sedikit masyarakat yang merasakan bahwa kegiatan migas memberi dampak sosial yang tinggi. Tidak lebih dari 10% masyarakat yang merasakan kegiatan migas memberi dampak sosial yang tinggi.

Tabel 5.2 Tingkat Dampak Sosial

Tingkat Dampak Sosial	Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Tinggi	2	6.7	6.7
Cukup	25	83.3	90.0
Rendah	3	10.0	100.0
Total	30	100.0	

Hasil survei mengenai persepsi masyarakat terhadap dampak sosial dari kegiatan migas menunjukkan bahwa adanya kegiatan migas cukup memberikan dampak terhadap sosial masyarakat. Sementara itu, data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kinerja pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Tanjung Jabung Timur cenderung mengalami

peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013. Akan tetapi, skor kinerja pembangunan SDM tersebut sedikit menurun pada tahun 2014. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan SDM adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk (jiwa);
2. Angka Harapan Hidup;
3. Indeks Pembangunan Hidup (IPM);
4. Rata-rata Lama Sekolah;
5. Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

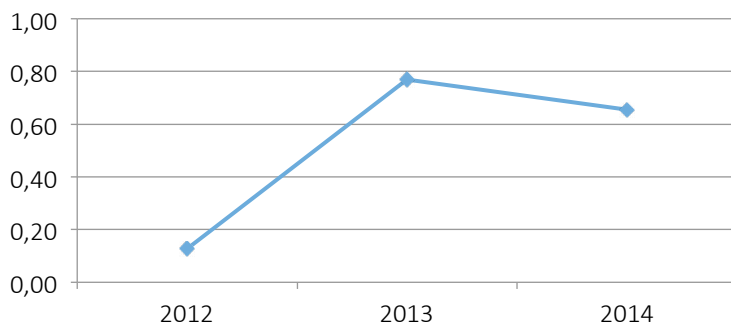
Kelima indikator tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan Analisis Komponen Utama. Skor kinerja pembangunan SDM Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada Grafik 5.14. Hasil analisis menunjukkan bahwa skor kinerja pembangunan SDM Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013. Hanya saja skor kinerja pembangunan SDM sedikit menurun pada tahun 2014. Hal yang menyebabkan skor pembangunan SDM meningkat sebesar 83% dari tahun 2012 ke tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah penduduk kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan hampir 700 jiwa dari tahun 2012 ke tahun 2013.
- 2) Peningkatan IPM kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2012 ke tahun 2013 yang cukup signifikan yaitu mendekati 1 poin.
- 3) Peningkatan rata-rata lama sekolah dari tahun 2012 ke tahun 2013 menunjukkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti sekolah lebih lama. Pada tahun 2012, rata-rata lama sekolah masyarakat Tanjung Jabung Timur sebesar 5,57. Nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Tanjung Jabung Timur mengenyam pendidikan selama 5 tahun atau setara dengan kelas 5 SD (Tidak

Tamat SD). Sementara itu, rata-rata lama sekolah masyarakat Tanjung Jabung Timur tahun 2013 sebesar 5,90 atau dapat dikatakan mendekati 6. Nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan dari yang semula hanya 5 tahun menjadi 6 tahun. Dengan kata lain, masyarakat Tanjung Jabung Timur mengenyam pendidikan selama 6 tahun atau setara dengan kelas 6 SD (Tamat SD).

- 4) Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan sebesar 5% dari tahun 2012 ke tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kegiatan migas diasumsikan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kabupaten Tanjung Jabung Timur. Apabila dilihat dari sisi ekonomi, PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur didominasi dari hasil subsektor pertambangan, minyak, dan gas bumi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kegiatan hulu migas dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Selain itu, kegiatan migas dapat menciptakan lapangan kerja lain seperti warung, rumah makan, usaha kos-kosan, dan sebagainya.

Grafik 5.14 Skor Kinerja Pembangunan SDM Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2014



Sumber: diolah dari data BPS

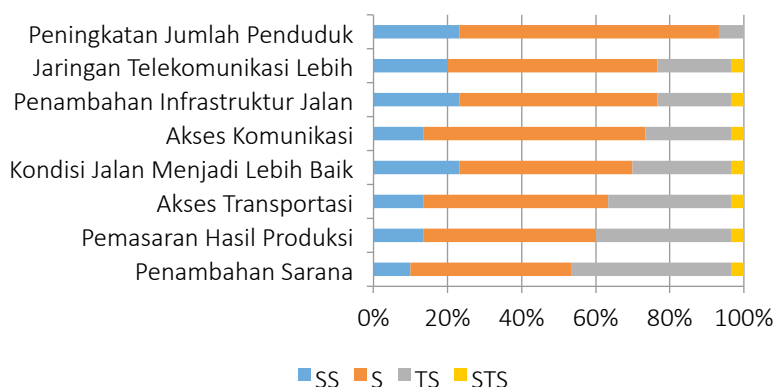
5.4 Dampak Pengembangan Wilayah

Kegiatan hulu migas di sekitar wilayah kerja migas memberikan dampak terhadap ekonomi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan pengembangan wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada subbab ini akan dibahas mengenai dampak pengembangan wilayah yang dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dampak tersebut diukur melalui persepsi masyarakat yang diukur melalui delapan pernyataan berskala likert. Adapun delapan pernyataan yang digunakan untuk mengukur dampak pengembangan wilayah yang dirasakan oleh masyarakat setelah adanya kegiatan migas adalah peningkatan jumlah penduduk, jaringan telekomunikasi lebih baik, penambahan infrastruktur jalan, akses komunikasi, kondisi jalan menjadi lebih baik, akses transportasi, pemasaran hasil produksi, dan penambahan sarana transportasi.

Dampak pengembangan wilayah yang dirasakan setelah adanya kegiatan hulu migas di sekitar wilayah kerja migas ditunjukkan pada Grafik 5.15. Hasil survei yang diperlihatkan Grafik 5.15 menunjukkan bahwa lebih dari separuh masyarakat kabupaten Tanjung Jabung Timur menyetujui pernyataan-pernyataan terkait dengan dampak pengembangan wilayah yang dirasakan setelah adanya kegiatan migas. Selain itu, gambar 1 juga memperlihatkan mayoritas masyarakat (lebih dari 75%) berpendapat bahwa dampak pengembangan wilayah yang dirasakan adalah sebagai berikut:

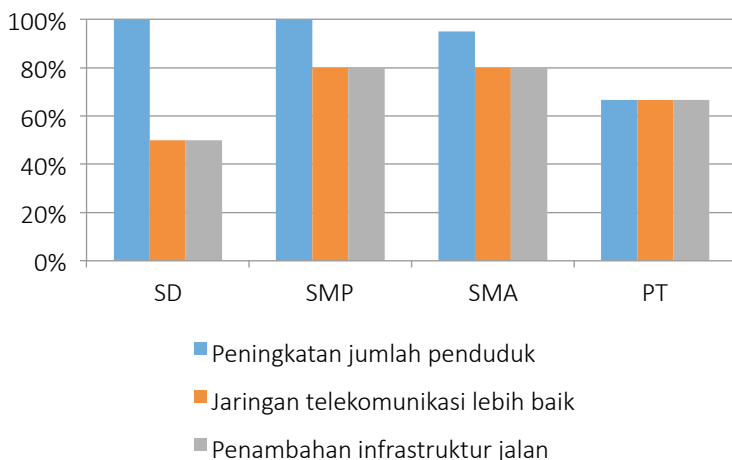
- 1) Peningkatan jumlah penduduk;
- 2) Jaringan telekomunikasi lebih baik; dan
- 3) Penambahan infrastruktur jalan.

Grafik 5.15. Dampak Pengembangan Wilayah



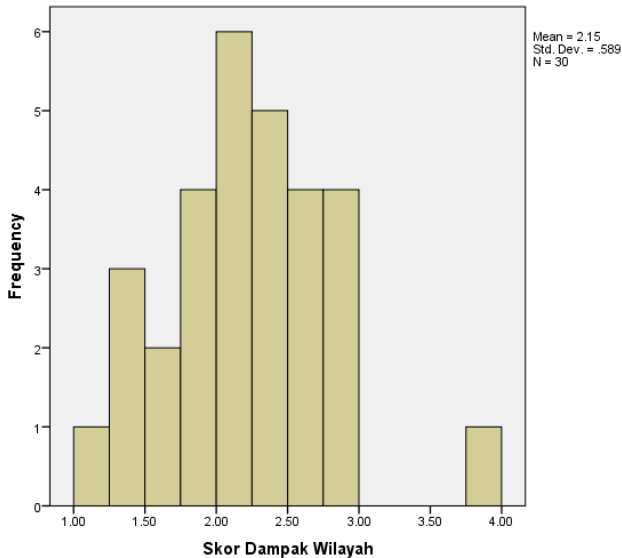
Dampak pengembangan wilayah yang paling dirasakan setelah adanya kegiatan migas berdasarkan pendidikan terlihat pada Grafik 5.16. Grafik tersebut menunjukkan bahwa di semua tingkat pendidikan, dampak pengembangan wilayah yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat adalah peningkatan jumlah penduduk, jaringan telekomunikasi lebih baik, dan penambahan infrastruktur jalan. Grafik tersebut juga menunjukkan bahwa persentase masyarakat di setiap tingkat pendidikan yang merasakan adanya peningkatan jumlah penduduk setelah adanya kegiatan migas cenderung lebih banyak dibandingkan dampak pengembangan wilayah lainnya. Hal ini dapat dilihat dari persentase masyarakat yang merasakan dampak berupa peningkatan jumlah penduduk di masing-masing tingkat pendidikan yang berada di atas 50%.

Grafik 5.16 Tiga Dampak Pengembangan Wilayah Yang Paling Dirasakan Setelah Adanya Kegiatan Hulu Migas



Setelah mengetahui dampak pengembangan wilayah yang paling dirasakan oleh masyarakat setelah adanya kegiatan hulu migas, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menghitung skor dampak pengembangan untuk masing-masing masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa skor dampak pengembangan wilayah memiliki nilai antara 1,13 sampai dengan 3,75. Skor dampak pengembangan wilayah suatu masyarakat yang semakin kecil menunjukkan bahwa semakin besar dampak pengembangan wilayah yang dirasakan oleh masyarakat tersebut setelah adanya kegiatan migas. Dengan menggunakan histogram dapat diperoleh informasi mengenai sebaran dari skor dampak pengembangan wilayah yang dihasilkan. Adapun sebaran dari skor tersebut dapat dilihat pada Grafik 5.17.

Grafik 5.17 Skor Dampak Pengembangan Wilayah



Berdasarkan sebaran skor dampak pengembangan wilayah (Grafik 5.17), maka nilai tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok. Ketiga kelompok tersebut dibuat berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Masyarakat dimasukkan ke dalam kelompok 1 apabila skor dampak pengembangan wilayah tersebut bernilai tidak kurang dari 1,25. Masyarakat yang masuk dalam kategori ini dikatakan sebagai kelompok yang merasakan dampak pengembangan wilayah yang tinggi setelah adanya kegiatan migas.
- 2) Masyarakat dimasukkan ke dalam kelompok 2 apabila skor dampak pengembangan wilayah tersebut bernilai antara 1,26 sampai dengan 2,50. Masyarakat yang masuk dalam kategori ini dikatakan sebagai kelompok yang merasakan

dampak pengembangan wilayah yang cukup setelah adanya kegiatan migas.

- 3) Masyarakat dimasukkan ke dalam kelompok 3 apabila skor dampak pengembangan wilayah tersebut bernilai lebih dari 2,50. Masyarakat yang masuk dalam kategori ini dikatakan sebagai kelompok yang merasakan dampak pengembangan wilayah yang rendah setelah adanya kegiatan migas.

Masyarakat di sekitar wilayah kerja migas merasakan dampak pengembangan wilayah yang cukup setelah adanya kegiatan migas (Tabel 5.3). Hal ini dapat dilihat dari persentase responden yang menyampaikan pendapat tersebut. Lebih dari 75% masyarakat merasakan dampak pengembangan wilayah yang cukup dari adanya kegiatan migas. Hanya 10% masyarakat yang merasakan kegiatan migas memberi dampak pengembangan wilayah yang tinggi bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel 5.3 Tingkat Dampak Pengembangan Wilayah

Tingkat Dampak Pengembangan Wilayah	Jumlah	Persentase	Persentase Kumulatif
Tinggi	3	10.0	10.0
Cukup	20	66.7	76.7
Rendah	7	23.3	100.0
Total	30	100.0	

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan dalam penelitian ini, persepsi masyarakat terhadap dampak pengembangan migas dari kegiatan migas menunjukkan bahwa adanya kegiatan migas cukup memberikan dampak terhadap pengembangan wilayah. Hal ini didukung oleh data sekunder yang diperoleh dari BPS. Data tersebut

menunjukkan bahwa kinerja pembangunan infrastruktur Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 cenderung mengalami peningkatan. Adapun indikator penyusun skor kinerja pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase jalan berstatus baik;
- 2) Rasio jumlah Sekolah Dasar (SD) terhadap murid (per 1000 murid);
- 3) Persentase desa berlistrik;
- 4) Rasio fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk (per 1000 jiwa);
- 5) Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk (per 1000 jiwa);
- 6) Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan sumber air ledeng.

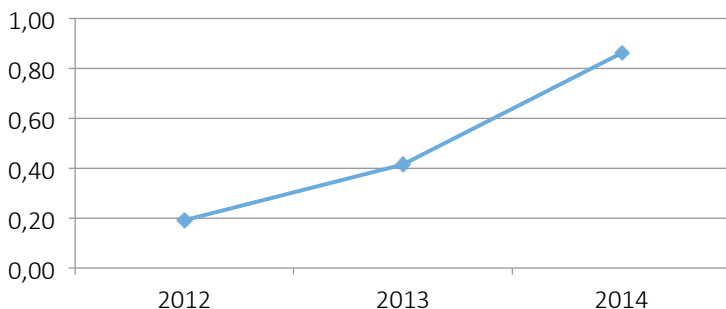
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan keenam indikator di atas, skor kinerja pembangunan infrastruktur Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini dapat dilihat dari skor kinerja pembangunan infrastruktur yang semula bernilai 0,19 mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan 2014 menjadi 0,42 dan 0,86. Skor kinerja pembangunan infrastruktur yang cenderung meningkat setiap tahunnya dilatarbelakangi oleh beberapa indikator antara lain:

- 1) Aspek ketersediaan dan kualitas jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur cenderung mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir.
- 2) Ketersediaan listrik di desa juga cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, persentase desa berlistrik di Tanjung Jabung Timur sebesar 72,10%. Sementara itu, persentase desa berlistrik tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan sebesar 2,90% dan 3,49%.

- 3) Persentase tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk (per 1000 jiwa) menunjukkan pertumbuhan yang positif selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

Akan tetapi, hasil survei memperlihatkan bahwa masyarakat Tanjung Jabung Timur memiliki persepsi dampak wilayah yang cukup rendah. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh ketidaktersediaan sumber utama air bersih. Air merupakan kebutuhan primer masyarakat Tanjung Jabung Timur. Masyarakat mungkin masih bisa bertahan hidup jika tidak ada listrik. Akan tetapi, mereka tidak dapat bertahan hidup jika tidak ada air. Indikator lain yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah jumlah SD dan fasilitas kesehatan. Rasio jumlah SD terhadap murid (per 1000 jiwa) cenderung mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir (2012-2014), akan tetapi jumlah penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah SD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. Hal serupa juga ditunjukkan oleh pertumbuhan fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk (per 1000 jiwa) yang tidak selaras dengan pertumbuhan penduduk.

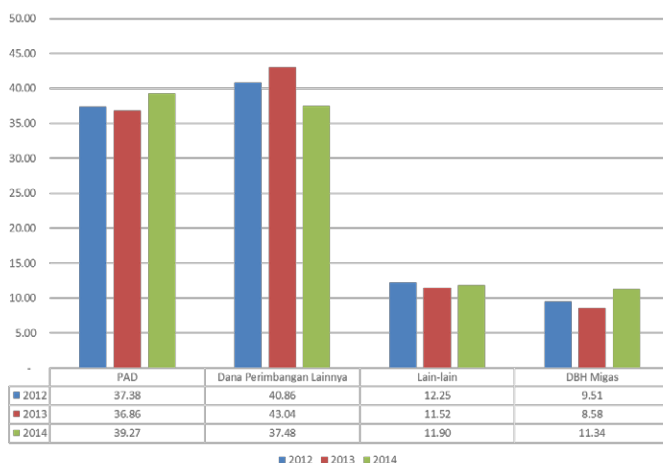
Grafik 5.18 Skor Kinerja Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2014



5.5 Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Migas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

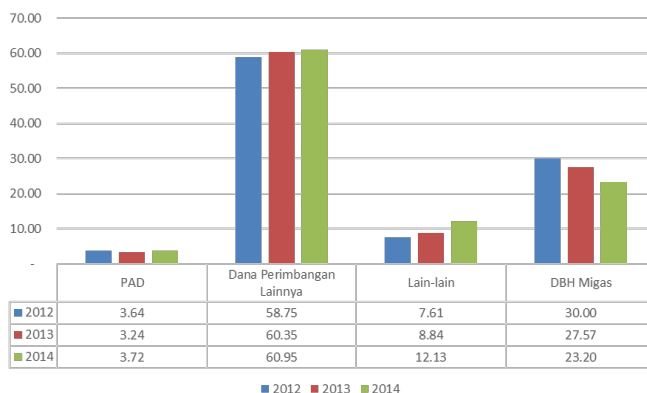
DBH migas merupakan salah satu komponen dari dana perimbangan yang menjadi bagian dalam pendapatan asli daerah. Grafik 5.19 menggambarkan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi pada tahun 2012 s.d. 2014, dimana rata-rata dana bagi hasil migas menyumbangkan 10% dalam realisasi pendapatan daerah.

Grafik 5.19 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jambi



Sumber: Jambi Dalam Angka (2015)

Grafik 5.20 Realisasi Pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber: Jambi Dalam Angka 2015

Sementara itu, untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada rentang waktu dari 2012 s.d. 2014, DBH Migas menyumbangkan hampir 30% terhadap pendapatan daerah, hal ini cukup signifikan mengingat realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur hampir 80% lebih berasal dari dana perimbangan yang mana DBH termasuk didalamnya, sebagaimana ditunjukkan oleh Grafik 5.20.

Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa walaupun secara persepsi masyarakat dan alokasi dari Pemerintah Pusat menunjukkan bahwa hadirnya kegiatan usaha hulu migas memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian regional, namun hal ini perlu diperjelas dengan aturan prioritas daerah dalam memanfaatkan dana bagi hasil migas agar DBH dapat dimanfaatkan secara tepat. Masyarakat harus selalu diberdayakan melalui peruntukan DBH, misalnya dengan mengadaptasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan meletakkan tiga manfaat prioritas DBH yakni (1) pengembangan SDM melalui program beasiswa, membangun

infrastruktur yang relevan dan memberdayakan pedesaan mandiri; (2) pembangunan infrastruktur daerah; dan (3) investasi sektor keuangan.

Ketergantungan yang tinggi terhadap DBH migas juga harus dihindari oleh daerah-daerah penghasil migas yang telah merasa “nyaman” dengan kondisi saat ini, mengingat DBH mengikuti fluktuasi harga minyak dunia yang dapat terpuruk sewaktu-waktu saat harga minyak dunia turun. Selain itu, sumber daya migas adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui, suatu saat akan ada titik jenuh dimana masyarakat tidak lagi bisa menikmati hasilnya.

Ke depan, dibutuhkan sinergi khusus antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pelaku usaha hulu migas dan masyarakat di sekitar wilayah kerja migas dalam menggerakkan perekonomian salah satunya dengan berupaya seoptimal mungkin agar transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dilakukan tepat waktu, guna mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah untuk menggunakan anggaran secara cepat dan efisien.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah didukung para pelaku usaha hulu migas diharapkan dapat lebih mengarahkan masyarakat untuk merencanakan pengembangan wilayah (dimulai dari RT/RW) dan mengembangkan potensi individu maupun kelompok, sehingga tidak lagi tergantung pada apa yang dapat diberikan oleh industri migas kepada mereka.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil kajian analisis dampak WK migas terhadap perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat terhadap dampak kegiatan hulu migas di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap perekonomian cenderung mengalami peningkatan yang signifikan, hal tersebut diperkuat dengan analisis faktor yang menjabarkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas ekonomi, ditandai dengan peningkatan pendapatan perkapita penduduk, PDRB per kapita, dan penyerapan tenaga kerja.
2. Persepsi masyarakat terhadap dampak kegiatan hulu migas di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap pembangunan sumber daya manusia juga mengalami peningkatan yang signifikan, hal tersebut diperkuat dengan analisis faktor yang menjabarkan bahwa terjadi peningkatan peningkatan rata-rata lama pendidikan, penurunan angka kemiskinan, dan kenaikan indeks pembangunan manusia.
3. Persepsi masyarakat terhadap dampak kegiatan hulu migas di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap pembangunan infrastruktur mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal tersebut diperkuat dengan analisis faktor yang menjabarkan bahwa terjadi peningkatan persentase jalan kondisi baik, penambahan sarana pendidikan & kesehatan, serta akses komunikasi & informasi yang semakin maju.

6.2 Rekomendasi

Agar kegiatan usaha hulu migas dapat memberikan dampak yang optimal terhadap perekonomian setempat, diperlukan sinergi khusus antara Pemerintah Pusat/Daerah, pelaku usaha hulu migas dan masyarakat di sekitar wilayah kerja migas dalam menggerakkan perekonomian, dengan fokus sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan berupaya seoptimal mungkin agar transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dilakukan tepat waktu, guna mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah untuk menggunakan anggaran secara cepat dan efisien.
2. Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten) agar bisa mengarahkan masyarakat agar dapat merencanakan pengembangan wilayah (dimulai dari RT/RW), memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk mengelola anggaran secara mandiri, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi yang ketat setiap program kerja.
3. Industri Hulu Migas agar bisa lebih menstimulasi warga di sekitar wilayah kerja, untuk lebih produktif dan kreatif dalam mengembangkan potensi individu maupun kelompok, sehingga terjadi kondisi yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfonsus Rinto Pudyantoro. 2012. *Dampak Kebijakan Fiskal dan Sektor Hulu Migas Perekonomian Provinsi Riau*. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. *Jambi Dalam Angka 2015*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi.
- _____. 2015. *Tinjauan Ekonomi Kabupaten Kota se Provinsi Jambi 2011 - 2015*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi.
- _____. 2015. *Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2015*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi.
- _____. 2014. *Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2014*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi.
- _____. 2015. *Statistik Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jambi.
- _____. 2013. *Indikator Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2013*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jambi.
- Dwi Retno Ariyanti dan Eko Budi Santoso. 2013. *Pengaruh Sektor Migas terhadap Pengembangan Wilayah Bojonegoro*. Institus Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS). Jawa Timur.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). 2015. *Laporan Kinerja Kementerian ESDM 2015*. KESDM, Jakarta.
- Raina, Junaidi, Yulmardi. 2015. *Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi*. Jurnal Perpesktif

Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 2 No. 3 2015.
Jambi

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) 2015. *Laporan Kinerja Tahunan SKK Migas 2015*. SKK Migas, Jakarta.

Solow, R. M. 1974. *The Economics of Resources*. American Economic Review, 64: 1 – 14.

Sugiyono, A. 2004. Perubahan Paradigma Kebijakan Energi Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Pascasarjana FEUI & ISEI, Jakarta.

Youngquist, W. 1999. *The Post Petroleum Paradigm and Population*. Population and Environment, 20: 297-315.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perhitungan Analisis Faktor

Tabel Skor Ekonomi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.25	2	6.7	6.7	6.7
	1.38	1	3.3	3.3	10.0
	1.50	1	3.3	3.3	13.3
	1.63	2	6.7	6.7	20.0
	1.75	3	10.0	10.0	30.0
	2.00	5	16.7	16.7	46.7
	2.13	3	10.0	10.0	56.7
	2.25	3	10.0	10.0	66.7
	2.38	3	10.0	10.0	76.7
	2.50	3	10.0	10.0	86.7
	2.75	1	3.3	3.3	90.0
	2.88	3	10.0	10.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tinggi	2	6.7	6.7	6.7
	Sedang	24	80.0	80.0	86.7
	Rendah	4	13.3	13.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Lampiran 1. Lanjutan

Tabel Skor Pembangunan Manusia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.50	2	6.7	6.7	6.7
	1.63	1	3.3	3.3	10.0
	1.88	2	6.7	6.7	16.7
	2.00	8	26.7	26.7	43.3
	2.25	1	3.3	3.3	46.7
	2.38	2	6.7	6.7	53.3
	2.50	3	10.0	10.0	63.3
	2.63	4	13.3	13.3	76.7
	2.75	1	3.3	3.3	80.0
	3.00	3	10.0	10.0	90.0
	3.25	2	6.7	6.7	96.7
	4.00	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tinggi	2	6.7	6.7	6.7
	Sedang	25	83.3	83.3	90.0
	Rendah	3	10.0	10.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Lampiran 1. Lanjutan

Tabel Skor Pembangunan Infrastruktur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.13	1	3.3	3.3	3.3
1.25	2	6.7	6.7	10.0
1.38	1	3.3	3.3	13.3
1.50	1	3.3	3.3	16.7
1.63	1	3.3	3.3	20.0
1.75	3	10.0	10.0	30.0
1.88	1	3.3	3.3	33.3
2.00	4	13.3	13.3	46.7
2.13	2	6.7	6.7	53.3
2.25	4	13.3	13.3	66.7
2.38	1	3.3	3.3	70.0
2.50	2	6.7	6.7	76.7
2.63	2	6.7	6.7	83.3
2.88	4	13.3	13.3	96.7
3.75	1	3.3	3.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tinggi	3	10.0	10.0	10.0
Sedang	20	66.7	66.7	76.7
Rendah	7	23.3	23.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Lampiran 1. Lanjutan

Nilai Korelasi Antar Variabel Ekonomi

		Laju Pertumbuhan Ekonomi	PDRB Perkapita	%Sektor Sekunder terhadap PDRB	%Sektor Tersier terhadap PDRB	%PDRB Kabupaten terhadap Provinsi	%PAD terhadap total Penerimaan Daerah	%Rumah Tangga yang memiliki pengeluaran < Rp. 200.000 / bulan	%Penduduk miskin
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pearson Correlation	1							
	Sig. (2-tailed)								
PDRB Perkapita	Pearson Correlation	.988	1						
	Sig. (2-tailed)	.097							
%Sektor Sekunder terhadap PDRB	Pearson Correlation	-.037	-.188	1					
	Sig. (2-tailed)	.976	.879						
%Sektor Tersier terhadap PDRB	Pearson Correlation	.997	.974	.038	1				
	Sig. (2-tailed)	.048	.144	.976					
%PDRB Kabupaten terhadap Provinsi	Pearson Correlation	-.992	-.962	-.088	-.999	1			
	Sig. (2-tailed)	.080	.176	.944	.032				
%PAD terhadap total Penerimaan Daerah	Pearson Correlation	.981	.941	.156	.993	-.998	1		
	Sig. (2-tailed)	.123	.220	.900	.076	.044			
%Rumah Tangga yang memiliki pengeluaran < Rp. 200.000/bulan	Pearson Correlation	-.988	-1.000	.188	-.974	.962	-.941	1	
	Sig. (2-tailed)	.097	.000	.879	.145	.176	.220		
%Penduduk miskin	Pearson Correlation	.954	.897	.265	.974	-.984	.994	-.897	1
	Sig. (2-tailed)	.195	.291	.829	.147	.115	.071	.291	

Lampiran 1. Lanjutan

Hasil Estimasi Keragaman Variabel Indikator Pembangunan Ekonomi

	Initial	Extraction
Laju Pertumbuhan Ekonomi	1.000	1.000
PDRB Per Kapita ADHK	1.000	1.000
% Sektor Sekunder terhadap PDRB	1.000	1.000
% Sektor Tersier terhadap PDRB	1.000	1.000
% PDRB Kabupaten terhadap Provinsi	1.000	1.000
% PAD terhadap total Penerimaan Daerah	1.000	1.000
% Rumah Tangga yang memiliki pengeluaran < Rp. 200.000 / bulan	1.000	1.000
% Penduduk miskin	1.000	1.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

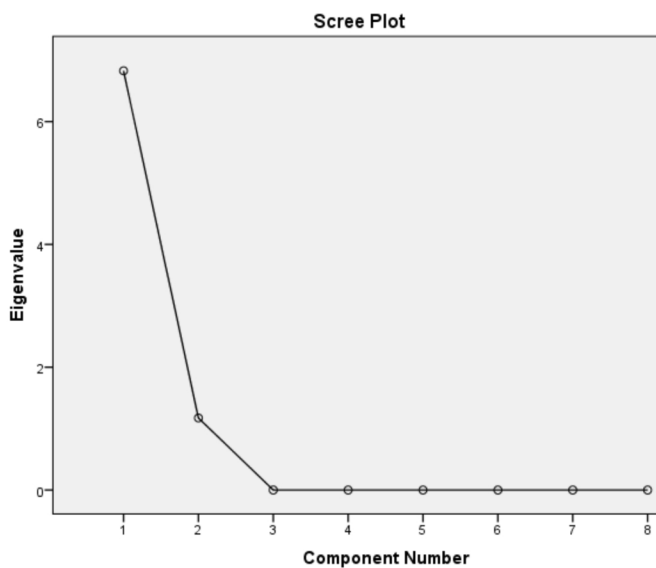
Lampiran 1. Lanjutan Persentase Keragaman Total Variabel Ekonomi

total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	6.827	85.338	85.338	6.827	85.338	85.338	6.826	85.321	85.321
2	1.173	14.662	100.000	1.173	14.662	100.000	1.174	14.679	100.000
3	3.478E-016	4.348E-015	100.000						
4	1.835E-016	2.294E-015	100.000						
5	1.118E-016	1.398E-015	100.000						
6	-3.409E-017	-4.261E-016	100.000						
7	-1.431E-016	-1.789E-015	100.000						
8	-2.905E-016	-3.631E-015	100.000						

Lampiran 1. Lanjutan

Screen Plot dari Komponen Ekonomi



Lampiran 1. Lanjutan

Besarnya Korelasi tiap Variabel Ekonomi

Rotated Component Matrix^a

	Component	
	1	2
Laju Pertumbuhan Ekonomi	.999	-.045
PDRB Per Kapita ADHK	.981	-.195
% Sektor Sekunder terhadap PDRB	.007	1.000
% Sektor Tersier terhadap PDRB	1.000	.031
% PDRB Kabupaten terhadap Provinsi	-.997	-.081
% PAD terhadap total Penerimaan Daerah	.989	.149
% Rumah Tangga yang memiliki pengeluaran < Rp. 200.000/bulan	-.981	.195
% Penduduk miskin	.966	.258

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Komponen Skor Ekonomi

Component Score Coefficient Matrix

	Component	
	1	2
Laju Pertumbuhan Ekonomi	.147	-.049
PDRB Per Kapita ADHK	.146	-.177
% Sektor Sekunder terhadap PDRB	-.010	.852
% Sektor Tersier terhadap PDRB	.146	.015
% PDRB Kabupaten terhadap Provinsi	-.145	-.058
% PAD terhadap total Penerimaan Daerah	.143	.116
% Rumah Tangga yang memiliki pengeluaran < Rp. 200.000/bulan	-.146	.177
% Penduduk miskin	.139	.210

Lampiran 1. Lanjutan.

Bentuk persamaan matematis yang diperoleh dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{KU1} = & 0,147 \text{ Laju Pertumbuhan Ekonomi} + 0,146 \text{ PDRB Per} \\ & \text{Kapita ADHK} + 0,146 \% \text{ Sektor Tersier terhadap PDRB} - \\ & 0,145 \% \text{ PDRB Kabupaten terhadap Provinsi} + 0,143 \\ & \% \text{ PAD terhadap total Penerimaan Daerah} - 0,146 \% \\ & \text{Rumah Tangga yang memiliki pengeluaran} < \text{Rp.} \\ & 200.000/\text{bulan} + 0,139 \% \text{ Penduduk miskin} \end{aligned}$$

(Persamaan 1)

Lampiran 1. Lanjutan

Nilai Korelasi Antar Variabel Indikator SDM

	Jumlah penduduk (jiwa)	Angka harapan hidup	Indeks pembangunan manusia	Rata-rata lama sekolah MYS	Tingkat partisipasi angkatan kerja %
Jumlah penduduk (jiwa)	Koef. Korelasi Nilai-p				
Angka harapan hidup	Koef. Korelasi Nilai-p	1.000			
Indeks pembangunan manusia	Koef. Korelasi Nilai-p	0.957 0.187	1.000		
Rata-rata lama sekolah MYS	Koef. Korelasi Nilai-p	0.967 0.164	0.953 0.195	1.000	
Tingkat partisipasi angkatan kerja %	Koef. Korelasi Nilai-p	0.723 0.486	0.980 0.127	0.875 0.322	1.000

Lampiran 1. Lanjutan

Hasil Estimasi Keragaman Variabel Indikator SDM

Communalities

	Initial	Extraction
Jumlah penduduk (jiwa)	1.000	.773
Angka harapan hidup	1.000	.876
Indeks pembangunan manusia	1.000	.996
Rata-rata lama sekolah MYS	1.000	.944
Tingkat partisipasi angkatan kerja %	1.000	.931

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Lampiran 1. Lanjutan

Persentase Keragaman Total Variabel SDM

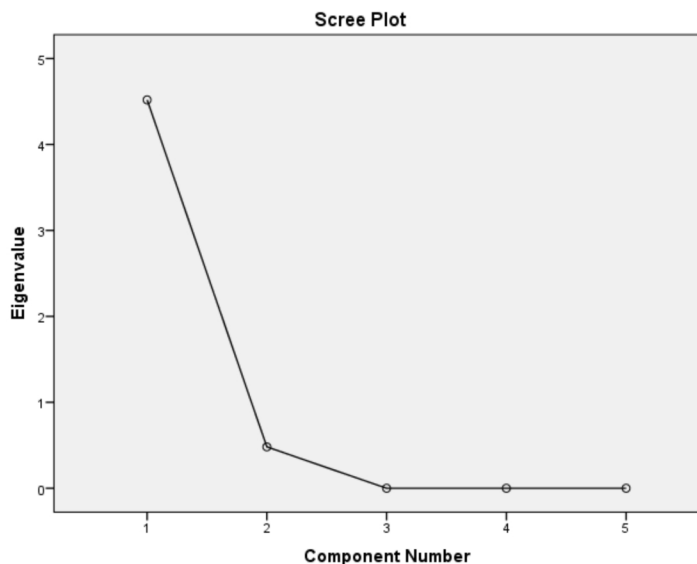
Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues		Extraction Sums of Squared Loadings	
	Total	% of Variance	Total	% of Variance
1	4.519	90.377	4.519	90.377
2	.481	9.623		
3	1.926E-016	3.852E-015		
4	2.023E-018	4.045E-017		
5	-1.368E-016	-2.735E-015		
		100.000		100.000
		100.000		100.000
		100.000		100.000
		100.000		100.000
		100.000		100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Lampiran 1. Lanjutan

Screen Plot dari Komponen Pembangunan SDM



Besarnya Korelasi tiap Variabel SDM

Component Matrix^a

	Component
	1
Jumlah penduduk (jiwa)	.879
Angka harapan hidup	.936
Indeks pembangunan manusia	.998
Rata-rata lama sekolah MYS	.971
Tingkat partisipasi angkatan kerja %	.965

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

Lampiran 1. Lanjutan

Komponen Skor SDM

Component Score Coefficient Matrix

	Component
	1
Jumlah penduduk (jiwa)	.195
Angka harapan hidup	.207
Indeks pembangunan manusia	.221
Rata-rata lama sekolah MYS	.215
Tingkat partisipasi angkatan kerja %	.214

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Bentuk persamaan matematis yang diperoleh dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut.

$$KU1 = 0,195 \text{ Jumlah penduduk (jiwa)} + 0,207 \text{ Angka harapan hidup} + 0,221 \text{ Indeks pembangunan manusia} + 0,215 \text{ Rata-rata lama sekolah MYS} + 0,214 \text{ Tingkat partisipasi angkatan kerja}$$

(Persamaan 2)

Lampiran 1. Lanjutan

Nilai Korelasi Antar Variabel Infrastruktur

		% Jalan berstatus baik	Rasio jumlah sekolah dasar terhadap murid (per 1000 murid)	% RT ygn memiliki telepon	% Desa berlistrik	Rasio fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk (per 1000)	Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk (per 1000)	% RT yg menggun- akan sumber air leding
% Jalan berstatus baik	Koef. Korelasi	1.000	-0.969	-0.982	0.990	-0.945	0.880	-0.755
	Nilai-p		0.159	0.122	0.088	0.211	0.315	0.455
Rasio jumlah sekolah dasar terhadap murid (per 1000 murid)	Koef. Korelasi	-0.969	1.000	0.904	-0.926	0.987	-0.970	0.569
	Nilai-p	0.159		0.281	0.247	0.052	0.156	0.614
% RT ygn memiliki telepon	Koef. Korelasi	-0.982	0.904	1.000	-0.999	0.866	-0.773	0.866
	Nilai-p	0.122	0.281		0.034	0.333	0.437	0.333
% Desa berlistrik	Koef. Korelasi	0.990	-0.926	-0.999	1.000	-0.891	0.806	-0.838
	Nilai-p	0.088	0.247	0.034		0.299	0.403	0.367
Rasio fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk (per 1000)	Koef. Korelasi	-0.945	0.997	0.866	-0.891	1.000	-0.987	0.500
	Nilai-p	0.211	0.052	0.333	0.299		0.104	0.667
Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk (per 1000)	Koef. Korelasi	0.880	-0.970	-0.773	0.806	-0.987	1.000	-0.353
	Nilai-p	0.315	0.156	0.437	0.403	0.104		0.771
% RT yg menggunakan sumber air leding	Koef. Korelasi	-0.755	0.569	0.866	-0.838	0.500	-0.353	1.000
	Nilai-p	0.455	0.614	0.333	0.367	0.667	0.771	

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 1. Lanjutan

Hasil Estimasi Keragaman Variabel Indikator Infrastruktur

Communalities

	Initial	Extraction
% Jalan berstatus baik	1.000	.999
Rasio jumlah sekolah dasar terhadap murid (per 1000 murid)	1.000	.952
% RT yg memiliki telepon	1.000	.953
% Desa berlistrik	1.000	.973
Rasio fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk (per 1000)	1.000	.910
Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk (per 1000)	1.000	.797
% RT yg menggunakan sumber air leding	1.000	.542

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Lampiran 1. Lanjutan

Persentase Keragaman Total Variabel Infrastruktur

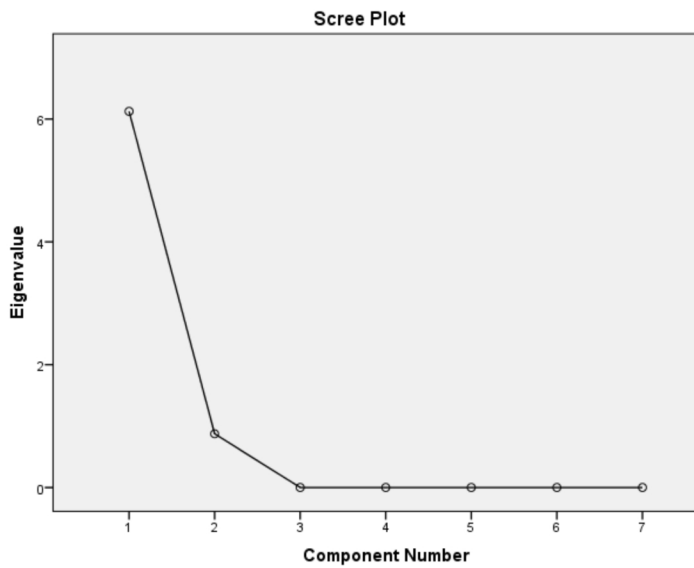
Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues		Extraction Sums of Squared Loadings	
	Total	% of Variance	Total	% of Variance
1	6.126	87.509	6.126	87.509
2	.874	12.491		
3	1.780E-016	2.543E-015		
4	1.461E-016	2.087E-015		
5	1.270E-017	1.814E-016		
6	-1.358E-016	-1.940E-015		
7	-2.351E-016	-3.359E-015		

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Lampiran 1. Lanjutan

Screen Plot dari Komponen Infrastruktur



Lampiran 1. Lanjutan

Besarnya Korelasi tiap Variabel Infrastruktur

Component Matrix^a

	Component
	1
% Jalan berstatus baik	-1.000
Rasio jumlah sekolah dasar terhadap murid (per 1000 murid)	.976
% RT yg memiliki telepon	.976
% Desa berlistrik	-.986
Rasio fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk (per 1000)	.954
Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk (per 1000)	-.893
% RT yg menggunakan sumber air leding	.736

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

Lampiran 1. Lanjutan

Komponen Skor

Component Score Coefficient Matrix

	Component
	1
% Jalan berstatus baik	-.163
Rasio jumlah sekolah dasar terhadap murid (per 1000 murid)	.159
% RT yg memiliki telepon	.159
% Desa berlistrik	-.161
Rasio fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk (per 1000)	.156
Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk (per 1000)	-.146
% RT yg menggunakan sumber air leding	.120

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Bentuk persamaan matematis yang diperoleh dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut.

$$\text{KU1} = -0,163 \text{ \% Jalan berstatus baik} + 0,159 \text{ Rasio jumlah sekolah dasar terhadap murid (per 1000 murid)} + 0,159 \text{ \% RT yg memiliki telepon} - 0,161 \text{ \% Desa berlistrik} + 0,156 \text{ Rasio fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk (per 1000)} - 0,146 \text{ Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk (per 1000)} + 0,120 \text{ \% RT yg menggunakan sumber air leding}$$

(Persamaan 3)



Eksplorasi sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia sudah berlangsung lebih dari 125 tahun, berawal dari ditemukannya sumur minyak bumi pertama di Desa Telaga Said, Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang mulai memproduksi pada 15 Juni 1885. Miliaran barel minyak dan gas bumi telah mengalir dari perut bumi nusantara yang setiap tahunnya menjadi sumber pendapatan bagi negara dan motor penggerak perekonomian nasional. Namun, potret umum yang terjadi di wilayah penghasil minyak dan gas bumi masih jauh dari harapan. Masih tingginya angka kemiskinan, rendahnya indeks pembangunan manusia, dan minimnya pembangunan infrastruktur menjadi masalah utama di sekitar wilayah kerja migas. Tidak ada kata terlambat untuk menerapkan kembali konsep pembangunan berkelanjutan agar daerah-daerah penghasil migas bisa merasakan dampak yang lebih signifikan dari aktivitas hulu migas.



www.esdm.go.id
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEMENTERIAN ESDM
2016

